

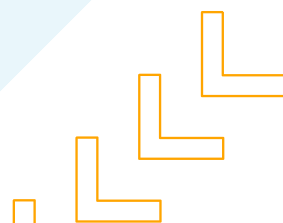
LMCK

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN

2025

TRIWULAN II





**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan	15/7/25	
2.	Diperiksa	Dede Suryanto, S.T	Ketua Tim Pengelolaan Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	16/7 ²⁵	
3.	Diperiksa	Fitriyani, S.H.,M.M.TR	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	16/7/2025	
4.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal Penumpang, Subdirektorat Terminal Penumpang	16/7/25	
5.	Disetujui	Yugo Kristanto, S.Si.T, M.T.	Kepala Subdirektorat Terminal Penumpang	16/7/25	



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	15/7/25	
2.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	16/7/2025	
3.	Diperiksa	Fitroh, ST, MT	Ketua Tim Tataan Jaringan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	16/7/25	
4.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SIT, M.SI	Ketua Tim Kerjasama dan Kepengusahaan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	16/7/2025	
5.	Diperiksa	Junisar Cahyadi, ST	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Jaringan dan Kerjasama serta Kepengusahaan Transportasi Jalan, Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	16/7/2025	
6.	Disetujui	Susanty Pertiwi, SS, M.HUM	Kepala Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan	16/7/25	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	15-07-25	
2.	Diperiksa	Tri Handoko Putro, S.Psi.,M.M.TR	Ketua Tim Pengelolaan Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang	16/7/25	
3.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	16/7 ²⁵	
4.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos,M.M.TR	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Terminal Barang, Sub Direktorat Terminal Barang	16/7 ²⁰²⁵	
5.	Disetujui	Riko Hanafi, ST, MT	Kepala Subdirektorat Terminal Barang	16/7 ²⁵	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Destiana Herawati, S.SiT	Penelaah Teknis Kebijakan	15/7/25	
2.	Diperiksa	Dian Ardhiya E, A.Md LLAJ, SE, M.M.Tr	Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/7/25	
3.	Diperiksa	Hariyanto, ST	Ketua Tim Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/7 ²⁰²⁵	
4.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr	Ketua Tim Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/7/25	
5.	Disetujui	Handjar Dwi Antoro, ATD MT	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	16/7 ²⁰²⁵	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	15/7/2025	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	16/7/25	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	17/7/25	

KATA PENGANTAR

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2025, ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 4 (empat) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari 12 (dua belas) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 7 (tujuh) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 5 (lima) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar **0,928** (target Tahun 2025 sebesar 0,852), dengan capaian kinerja sebesar **108,92%**;
2. Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM terealisasi sebesar **90,47** (target Tahun 2025 sebesar 90,47), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
3. Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan terealisasi sebesar **0,636** (target Tahun 2025 sebesar 0,636), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terealisasi sebesar **3,382** (target Tahun 2025 sebesar 3,38 dengan capaian kinerja sebesar **100,06%**);
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terealisasi sebesar **82,76** (target Tahun 2025 sebesar 82,30), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran terealisasi sebesar **98,92** (target Tahun 2025 sebesar 94,10), dengan capaian kinerja sebesar **105,12%**;

Indikator Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$) :

1. Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 0,077), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;
2. Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 60), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;
3. Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman terealisasi sebesar **21** (target Tahun 2025 sebesar 60), dengan capaian kinerja sebesar **35%**;
4. Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 60), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;
5. Indeks Pengelolaan Aset terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 3,20), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;

6. Tingkat Digitalisasi Arsip terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 75), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;

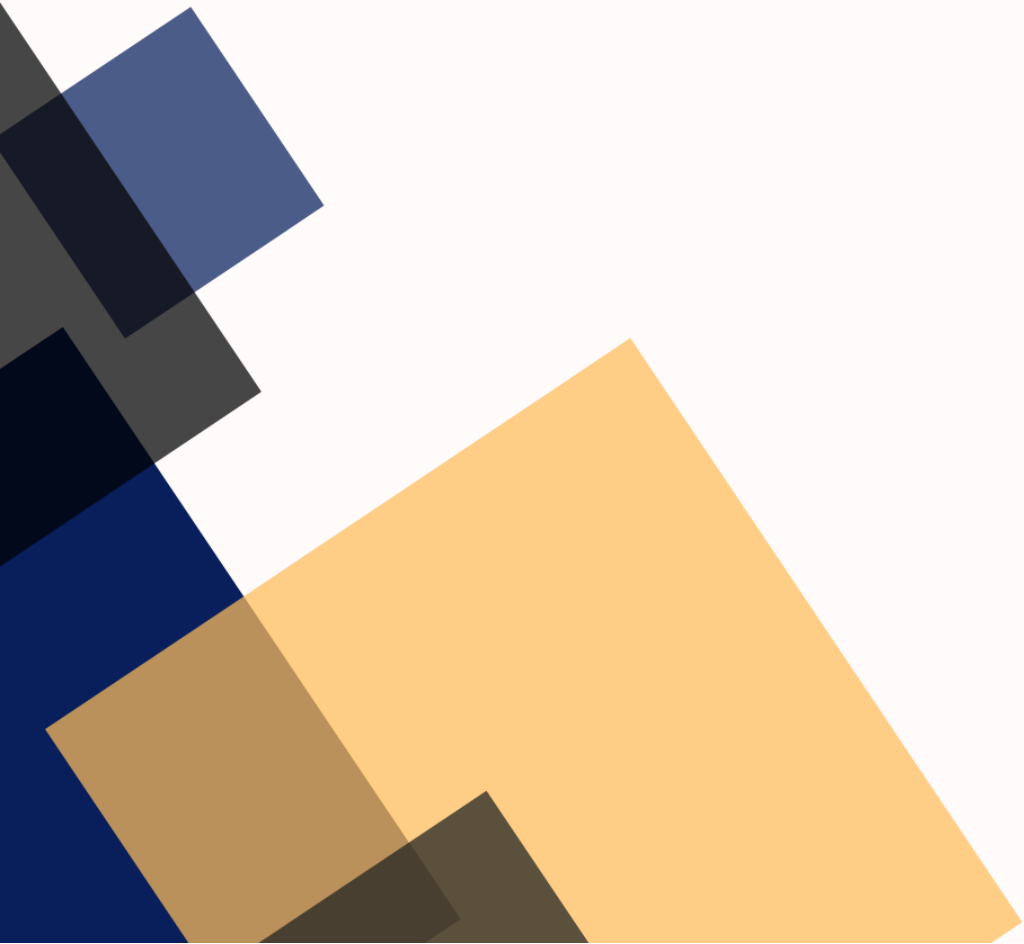
Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian Sasaran Kinerja adalah sebesar **46,73%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebesar **54,14%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat sejumlah kendala seperti perubahan organisasi, keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, serta belum tersusunnya regulasi secara menyeluruh, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tetap menunjukkan potensi capaian positif, khususnya pada indikator layanan terminal tipe A yang melampaui target.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta melakukan perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui sinergi antarunit kerja, optimalisasi sumber daya, dan pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala guna mendukung terwujudnya transportasi jalan yang andal, inklusif, dan berdaya saing sesuai dengan arah kebijakan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025–2029.



BAB 1

PENDAHULUAN



I.2.1 Bagan Struktur Organisasi



I.3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Triwulan II Tahun 2025 diklasifikasikan menurut sub unit kerja sebanyak **93 orang** pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	9	-	6	4	19
2.	Sub Direktorat Terminal Penumpang	12	-	4	-	16
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14	-	5	1	20
4.	Sub Direktorat Terminal Barang	15	1	1	2	19
5.	Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	12	1	5	1	19
Jumlah		62	2	21	8	93

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - i Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - ii Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - iii Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen).
 - ii Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat dengan DIPA Awal Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada T.A. 2025 sebesar Rp67.733.026.000,- dan DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II T.A. 2025 sebesar Rp67.733.026.000,-.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

- a) Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
- b) Pengoperasian Terminal Penumpang;
- c) ODOL (*Over Dimension Over Loading*);

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan II Tahun 2025 adalah:

- a) Rencana Strategis;
- b) Perjanjian Kinerja;
- c) Indikator Kinerja Kegiatan;
- d) Pengukuran Kinerja;
- e) Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I. 3. Sumber Daya Manusia
- I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I. 5. Sistematika Laporan
- I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

GA Program Infrastruktur Konektivitas

II.2.1 SK 3 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi

II.2.1.1 IKK 3.2.3 Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK 4 Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang

II.2.2.1 IKK 4.2.3 Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan

II.2.3.1 IKK 7.1.3.A Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 7.1.3.B Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 7.1.3.C Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

II.2.4.1IKK 9.4.3.A Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4.1IKK9.4.3.B Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK 13 Meningkatkan Layanan Manajemen SDM Internal

II.2.5.1IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5.2IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5.3 IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5.4 IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.6 SK 14 Meningkatkan Layanan Perkantoran

II.2.6.1 IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1 Pagu Anggaran

- a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

II.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2025

- a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2025

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

- II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
- II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- II.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- II.3.3.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
- II.3.3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
- II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditandatangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditandatangani pimpinan);
3. Rencana Aksi Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditandatangani pimpinan);
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029 ini memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang selaras dengan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Renstra ini diharapkan merupakan turunan dari pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan darat dan mendukung terwujudnya **Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045**.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
	GA Program Infrastruktur Konektivitas									
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	-	-	24	46
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	25	34	43	51
			IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100	100	100	100	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	60	-	93	93	91
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	30	35	40	45
	WA Program Dukungan Manajemen									
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setian Direktorat	%	75	100	100	100	100

1.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan target kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I 3 Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60
			IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	60
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

1.6.2. Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan target kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I 3 Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
3	SK 02	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	KK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636
3	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
4	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2025 sebesar Rp67.733.026.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60
			IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	60
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Kegiatan

1. Penunjang teknis transportasi darat
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

Rp38.406.000.000,00
Rp38.674.313.000,00
Rp22.877.088.000,00

I.7.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Juni 2025 sebesar Rp67.733.026.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077
3	SK 02	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	KK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyajian KPBU oleh simpul KPBU	%	60

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636
3	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
4	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan

1. Penunjang teknis transportasi darat
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

Anggaran

Rp38.406.000.000,00
Rp38.674.313.000,00
Rp22.877.088.000,00



BAB II

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dimasa mendatang.

• Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi E-Performance, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 2 (dua) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029 yaitu Terwujudnya nilai tambah Prasarana Transportasi Jalan dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025-2029 dan Terwujudnya Prasarana Transportasi Jalan yang handal, inklusif, dan berdaya saing, dengan bermuara pada terwujudnya 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel II 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2		
				T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi					0,0%			108,92%
IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852	0,852	0	0,00%	0,852	0,928	108,92%
SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang					0,00%			0,00%
IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077	0,077	0	0,00%	0,077	0	0,00%
SK 02	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan					33,33%			45,00%
IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47	90,47	90,47	100,00%	90,47	90,47	100,00%
IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	60	0	0,00%	60	0	0,00%
IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	60	0	0,00%	60	21	35%
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					0,0%			50,00%
IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	60	0	0,00%	60	0,0	0,00%
IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636	0,636	0	0,00%	0,636	0,636	100%
SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal					76,66%			76,44%
IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	3,38	3,382	100,06%	3,38	3,382	100,06%
IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30	82,30	83,51	101,47%	82,30	82,76	100,56%
IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	94,10	100,00	106,27%	94,10	98,92	105,12%
IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	3,20	0	0,00%	3,20	0	0,00%
SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran					0,0%			0,00%
IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	75	0	0,00%	75	0	0,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						18,38%			46,73%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						33,98%			54,14%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						4			7
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						8			5

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Jika dilihat lebih detail, pada Tahun 2025, berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pada Triwulan II Tahun 2025 dari 12 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 7 (tujuh) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 5 (lima) IKK dengan status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).

Selama Tahun 2025, terdiri 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 5 (lima) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 SK 3 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan **konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi**.

Tabel II 2 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan antar Provinsi)

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK 3 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi					
IKK 3.2.3	Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas	rasio	0,852		
		Target		0,852	0
		Realisasi		0	0,928
		Capaian		0,00%	108,92%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 01 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 3.2.3. Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas;

II.2.1.1 IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3.2.3. Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 3 Capaian Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas

SK 3		Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	
IKK 3.2.3	Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas		Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	0,852	0,852	
Realisasi	0	0,928	
Capaian	0,00%	108,92%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A untuk Mendukung Konektivitas merupakan perbandingan antara Jumlah Terminal Tipe A yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat dengan Target Terminal Tipe A beroperasi 2025-2029, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas = Jumlah Terminal Tipe A yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat / Target Terminal Tipe A beroperasi 2025-2029

Adapun *baseline* Jumlah Terminal Tipe A yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat sebanyak 109 pada awal tahun 2025 dan Target Terminal Tipe A beroperasi 2025-2029 sebanyak 118 Terminal Tipe A dengan rincian tambahan terminal yang beroperasi sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A Jepara
2. Terminal Tipe A Tanjung Selor
3. Terminal Tipe A Mandai
4. Terminal Tipe A Singkawang
5. Terminal Tipe A Songka Palopo

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,928 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 0,852 maka capaian kinerja mencapai 108,92%.

Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas.



Gambar II 1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Target Kinerja Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Operasional Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan berdasarkan beberapa acuan peraturan dan keputusan antara lain :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Indonesia;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Indonesia;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Indonesia.

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja program Rasio Konektivitas Transportasi Jalan, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target Rasio Konektivitas Transportasi Jalan ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Penyesuaian ini juga mengakomodasi faktor–

faktor eksternal seperti potensi peningkatan volume kendaraan, kondisi geografis, dan prioritas pembangunan jalan yang tengah disiapkan dalam Renstra. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

1. Masih terdapat beberapa terminal yang masih dalam proses serah terima ke Ditjen Hubdat antara lain Terminal Tipe A Poris Plawad, Terminal Tipe A Pondok Cabe, Terminal Tipe A Jatijajar dan Terminal Tipe A Baranangsiang;
2. Pembangunan Terminal Tipe A baru belum dapat terlaksana pada tahun ini dikarenakan terkena efisiensi sehingga diusulkan kembali pada TA. 2026.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

- Jumlah Terminal Tipe A yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat = 109 terminal
- Target Terminal Tipe A beroperasi 2025-2029 = 118 terminal

Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas =

Jumlah Terminal Tipe A yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat / Target Terminal Tipe A beroperasi 2025-2029 = $109 / 118 = 0,928$.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Triwulan II Tahun 2025 terhadap target PK Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,928}{0,852} \times 100\% = 108,92\%$$

Pada Triwulan II Tahun 2025 masih belum terdapat penambahan jumlah Terminal tipe A yang beroperasi dikarenakan beberapa terminal masih dalam proses serah terima dan pembangunan terminal baru yang terkena efisiensi.

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Triwulan II Tahun 2025 Rp. 10.002.313.000,- dengan posisi pada Triwulan II terdapat realisasi senilai Rp. 152.748.113,- atau mencapai 1,5271% dikarenakan efisiensi anggaran;

Tabel II 4 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW II	Realisasi TW II	
			Keuangan (Rp)	Pagu (%)
IKK 3.2.3.Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas 1. 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)	Rp10.002.313.000,	Rp10.002.313.000,	Rp152.748.113,-	1,5271%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi melalui pembangunan terminal baru, revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
2. Meningkatkan kualitas layanan terminal melalui pemenuhan SPM Terminal Tipe A;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal Tipe A misalnya dengan pelaksanaan *excellent service* untuk meningkatkan minat pengguna terminal maupun operator bus untuk menaik-turunkan penumpang di terminal.

II.2.2 SK 4 Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel II 8 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang dengan Terminal Angkutan Barang

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK 4 Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang					
IKK 4.2.3	Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas	rasio	0,077		
		Target		0,077	0,077
		Realisasi		0	0
		Capaian		0,00%	0,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 4.2.3 Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas;

II.2.2.1 IKK 1 4.2.3 Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang pada IKK Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 9 Capaian Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas

SK 4	Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang		
IKK 4.2.3	Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas		Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	0,077	0,077	
Realisasi	0	0	
Capaian	0,00%	0,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas merupakan perbandingan antara Jumlah Terminal Barang yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat dengan Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rasio beroperasinya layanan terminal barang untuk mendukung konektivitas = Jumlah Terminal Barang yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat / Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Tahun 2025 sebesar 0,077 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4.** Grafik Capaian IKK Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas.



Gambar II 3 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 4.2.3 Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Dalam rangka memberikan pedoman bagi penyelenggara terminal barang dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada seluruh pengguna terminal, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang. Peraturan ini memuat standar pelayanan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal yang meliputi :

- Pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Barang untuk Umum;
- Kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- Keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
- Pemanfaatan teknologi informasi;
- Penerapan standar keselamatan kerja;
- Kelancaran lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal Barang untuk Umum.

• Narasi Kronologi Target

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah

mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi dalam beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas antara lain :

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat backlog kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

- Jumlah Terminal Barang yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat = 0 terminal
- Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029 = 9 terminal

Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas =

Jumlah Terminal Barang yang dioperasikan oleh Ditjen Hubdat / Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029 = $0/9 = 0,00$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I PK Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ capaian} = 0,00 / 0,077 = 0 \%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran untuk Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas Triwulan II Tahun 2025 dengan Pagu anggaran sebesar Rp269.332.000,- dengan posisi pada Triwulan II terdapat realisasi senilai Rp. 0,- atau mencapai 0% dikarenakan efisiensi anggaran;

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW II	Realisasi TW II	
			Keuangan (Rp)	Pagu (%)
IKK 4.2.3. Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas 1. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia	Rp269.332.000,-	Rp0,-	Rp0,-	Rp0,-

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan jumlah Terminal Barang yang siap beroperasi;
2. Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal barang melalui revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
3. Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal barang melalui peningkatan fasilitas melalui revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal barang melalui sertifikasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Terminal barang.

II.2.3 SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

- **Uraian Kegiatan**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel II 8 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					
IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	60		
		Target		90,47	90,47
		Realisasi		90,47	90,47
		Capaian		100,00%	100,00%
IKK 7.1.3.B	Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU	%	60		
		Target		60	60
		Realisasi		0	0
		Capaian		0%	0%
IKK 7.1.3.C	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman	%			
		Target		60	0
		Realisasi		0	21
		Capaian		0%	35%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7.1.3.A Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM;
2. IKK 7.1.3.B Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU
3. IKK 7.1.3.C Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

II.2.3.1 IKK 7.1.3.A Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 11 Capaian Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM

SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan		
IKK 7.1.3.A	Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM		Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	90,47%	90,47%	
Realisasi	90,47%	90,47%	
Capaian	100%	100%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM merupakan perbandingan antara kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dengan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut :

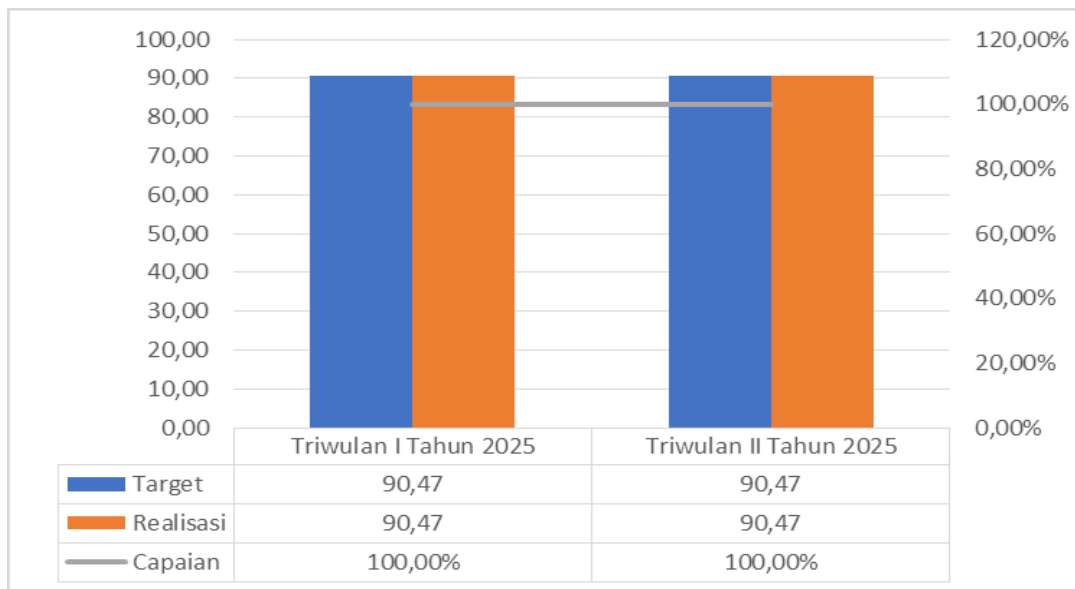
Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM = Jumlah Peron Keberangkatan Bus x Jam Operasi Terminal per Hari x Kapasitas Maksimal Peron per Jam x Jumlah Hari Operasi per Tahun

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM = Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A dari terminal-terminal yang memenuhi SPM jalur keberangkatan. Adapun kriteria pemenuhan SPM jalur keberangkatan bus sebagai berikut :

1. Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur;
2. Letak jalur pemberangkatan kendaraan terpisah dengan jalur penurunan penumpang;
3. Letak jalur pemberangkatan kendaraan tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM sebesar 90,47% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 90,47% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5.** Grafik Capaian IKK Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM.



Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Jumlah Persentase beroperasi layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam rangka memberikan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Peraturan ini memuat standar pelayanan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal yang meliputi :

1. Pelayanan keselamatan;
2. Pelayanan keamanan;
3. Pelayanan kehandalan/keteraturan;
4. Pelayanan kenyamanan;
5. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan;
6. Pelayanan kesetaraan.

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja program Rasio Konektivitas Transportasi Jalan, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target Rasio Konektivitas Transportasi Jalan ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Penyesuaian ini juga mengakomodasi faktor-faktor eksternal seperti potensi peningkatan volume kendaraan, kondisi geografis, dan prioritas pembangunan jalan yang tengah disiapkan dalam Renstra. Dengan perubahan

tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

1. Masih cukup banyak Terminal Tipe A yang belum memenuhi kriteria SPM jalur keberangkatan namun sebagian besar diantaranya memiliki kapasitas yang rendah sehingga tidak terlalu berpengaruh pada perhitungan rasio;
2. Peraturan terkait standar pelayanan terminal perlu diperbarui mengingat belum memuat mekanisme perhitungan atau penilaian pelaksanaan SPM;
3. Peningkatan kapasitas terminal sesuai SPM pada tahun ini terkendala adanya efisiensi anggaran.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

- Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A = 36.456.565 kendaraan/tahun
- Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A sesuai SPM = 33.622.340 kendaraan/tahun

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM =

Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A sesuai SPM / Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A = $33.622.340 / 37.166.125 \times 100\% = 90,47\%$.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM pada Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90,47}{90,47} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM adalah melalui:

Tabel II 14 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan				
IKK 7.1.3.A Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang	Rp10.002.313.000	Rp10.002.313.000	Rp152.748.113	1,5271%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan				
Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)				

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A melalui pembangunan terminal baru, revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
2. Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal Tipe A melalui peningkatan fasilitas melalui revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal Tipe A misalnya dengan pelaksanaan excellent service untuk meningkatkan minat pengguna terminal maupun operator bus untuk menaik-turunkan penumpang di terminal.

II.2.3.1 IKK 7.1.3.B Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 11 Capaian Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU

SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan		
IKK 7.1.3.B	Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU		Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	60%	60%	
Realisasi	0%	0%	
Capaian	0,00%	0,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU merupakan perbandingan antara realisasi jumlah dokumen penyiapan KPBU dengan target dokumen penyiapan KPBU dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU = Realisasi Jumlah dokumen penyiapan KPBU / Target Jumlah dokumen penyiapan KPBU

Dokumen penyiapan KPBU dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU sebesar 0% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Tahun 2025 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 7.1.3.B Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU.



Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 7.1.3.B Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun muatan dalam dokumen penyiapan KPBU yaitu:

1. kajian strategis
2. kajian ekonomi
3. kajian komersial
4. kajian finansisl
5. kajian manajemen

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan,

sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada triwulan kedua, diharapkan terdapat realisasi pelaksanaan jika dibandingkan dengan triwulan pertama. Namun demikian dengan kondisi efisiensi anggaran, saat ini indikator kinerja sulit untuk mencapai realisasi sesuai dengan target.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait muatan dalam dokumen penyiapan KPBU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koordinasi dengan simpul KPBU terkait dokumen pendukung penyiapan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun *Training*.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU masih di temukan banyak permasalahan, yang selama Tahun 2025 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan sebagai berikut:

1. Terdapat muatan dalam dokumen penyiapan KPBU belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Masih terkendala efisiensi pelaksanaan anggaran sehingga dokumen penyiapan KPBU belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan;
3. Masih terdapat kekurangan SDM yang mumpuni dalam penyusunan dokumen penyiapan KPBU.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :
Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU = Realisasi Jumlah dokumen penyiapan KPBU / Target Jumlah dokumen penyiapan KPBU

Realisasi Jumlah dokumen penyiapan KPBU = 0 dokumen, Target Jumlah dokumen penyiapan KPBU = 2 dokumen

Jumlah dokumen penyiapan KPBU = $0/2 \times 100\% = 0\%$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU Tahun 2025 adalah melalui:

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan				
IKK 7.1.3.B Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokuman Andalalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Rp6.540.000.000	Rp6.540.000.000	Rp54.312.000	0,83%

Tabel II 14 Realisasi Anggaran

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dan berkala dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait muatan dalam penyusunan dokumen penyiapan KPBU;
2. Melakukan bimbingan teknis ataupun training bagi SDM yang berkompeten;
3. Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perhubungan Darat maupun stakeholders lainnya terkait dengan relaksasi maupun realokasi anggaran sehingga indikator kinerja dapat tercapai;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2.3 IKK 7.1.3.C Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 11 Capaian Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	
IKK 7.1.3.C	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2025
Target	60	
Realisasi	21	
Capaian	35%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

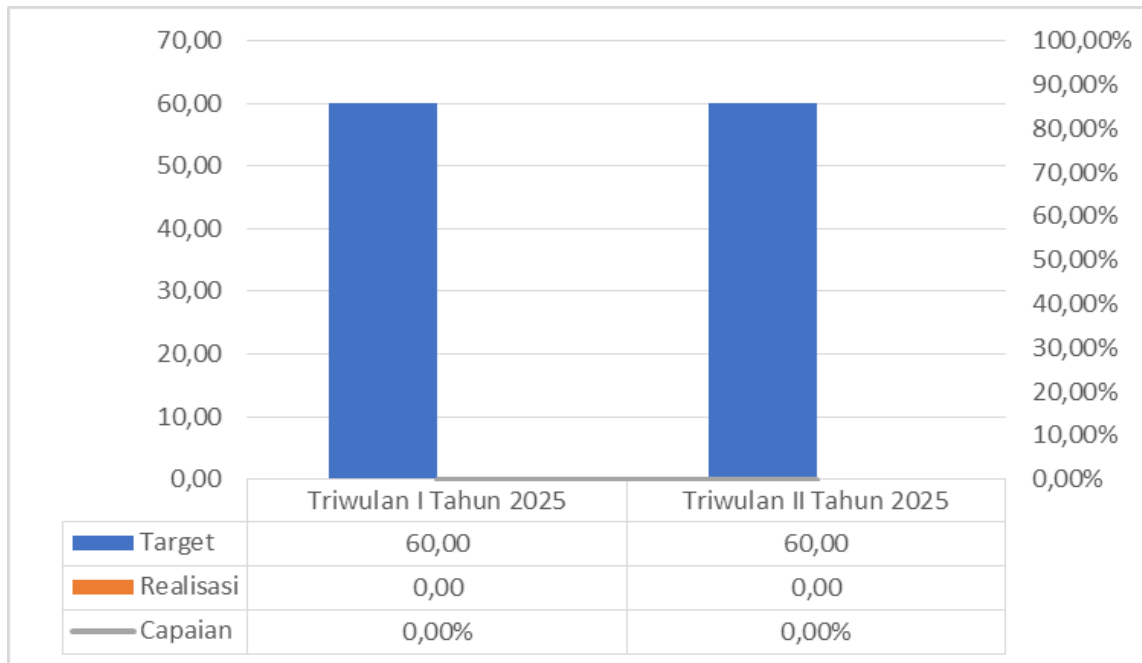
Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman merupakan perbandingan antara immediate outcome dan output kegiatan kerjasama kepengusahaan prasarana LLAJ dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman / Target Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman x 100%

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ per satuan waktu (tahun) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada di tiap-tiap satuan pelayanan terminal tipe a di Indonesia.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman sebesar 21 jika dibandingkan dengan target revisi II PK Tahun 2025 sebesar 60 maka capaian kinerja mencapai 35%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 2 Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman.



Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

(IKK 7.1.3.C Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman disusun realisasi tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana llaj dibandingkan dengan target tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana llaj. Indikator ini berhasil apabila realisasi sesuai dengan target, dimana target dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan keputusan pelaksanaan pemanfaatan pengusahaan prasarana LLAJ yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Adapun beberapa substansi yang tertuang dalam persetujuan dan pelaksanaan pemanfaatan antara lain:

1. Dasar Hukum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Objek BMN
5. Nilai Pemanfaatan BMN
6. Tata Cara Pembayaran
7. Jangka Waktu Perjanjian

8. Hak dan Kewajiban
9. Larangan Pengalihan
10. Berakhirnya Perjanjian
11. Keadaan Kahar (Force Majeure)
12. Penyelesaian Perselisihan
13. Bea Materai, Pajak-Pajak Dan Biaya Lain-Lain
14. Kerahasiaan
15. Korespondensi
16. Ketentuan Lainnya
17. Addendum

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada triwulan kedua, terdapat realisasi indikator kinerja kegiatan sehingga lebih realistis dan diharapkan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai Pengelola Transportasi Darat maupun Satuan Pelayanan untuk realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan;
2. Melakukan peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training;
3. Melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha, baik badan usaha, BUMN/D, koperasi, perorangan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk sosialisasi dan stimulasi kegiatan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman masih ditemukan banyak permasalahan, yang selama Tahun 2025 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak ditemukan sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa BPTD maupun Satuan Pelayanan yang belum menginventarisasi tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ;

2. masih terdapat kekurangan SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan kerjasama perusahaan prasarana LLAJ;
3. Masih kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan;
4. masih kurangnya koordinasi dengan stakeholders terkait untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :
Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman =
Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman / Target
Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = 21
dokumen, Target Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman =
60 dokumen

Jumlah dokumen penyiapan KPBU = $21/60 \times 100\% = 35\%$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{21}{60} \times 100\% = 35\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman Tahun 2025 adalah melalui:

Tabel II 14 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan				
IKK 7.1.3.C Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokuman Andalalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Rp6.540.000.000	Rp6.540.000.000	Rp54.312.000	0,83%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai Pengelola Transportasi Darat maupun Satuan Pelayanan untuk realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan;
2. Melakukan peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training;
3. Melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha, baik badan usaha, BUMN/D, koperasi, perorangan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk sosialisasi dan stimulasi kegiatan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan.

II.2.4 SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

II.2.4.1 IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 9.4.3.A. Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM.

Tabel II 17 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					
IKK 9.4.3.A	Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM	%	60		
		Target		60	60
		Realisasi		0	21
		Capaian		0,00%	35,00%
IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636		
		Target		0,636	0,636
		Realisasi		0,636	0,636
		Capaian		0	100

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 9.4.3.A. Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM.

II.2.4.1 IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 18 Capaian Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM

SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang		
IKK 9.4.3.A	Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM		Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	60%	60%	
Realisasi	0%	0%	
Capaian	0,00%	0,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM merupakan perbandingan antara kapasitas layanan penimbangan UPPKB yang sesuai dengan SPM dibagi dengan kapasitas layanan UPPKB dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM = $\frac{\text{Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM}}{\text{Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan}}$

Adapun kriteria Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM meliputi aspek:

- Kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;
- Alat penimbangan kendaraan bermotor bertanda tera sah yang berlaku;
- Standar dan spesifikasi Alat Penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketersediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi;
- Ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja;
- Ketepatan waktu pelayanan;
- Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan;
- Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana; dan
- Sarana pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian SPM, hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kategori Memenuhi, dengan hasil penilaian ≥ 90 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku;

- b. Kategori Cukup Memenuhi, dengan hasil penilaian antara 80 – 90 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku;
- c. Kategori Kurang Memenuhi, dengan hasil penilaian antara 60 – 80 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku; dan
- d. Kategori Tidak Memenuhi, dengan hasil penilaian ≤ 60 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku; dan
- e. Kategori Sangat Tidak Memenuhi, dengan kondisi belum dilakukan Tera alat penimbangan atau Tera tidak dalam masa berlaku.

Hasil Penilaian SPM Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam:

- a. Tindakan korektif untuk perbaikan standar operasional prosedur dan kinerja;
- b. Pemberian penghargaan;
- c. Usulan perbaikan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; atau
- d. Penutupan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Tahun 2025 sebesar 0 % maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM).



Gambar II 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM pada Triwulan II Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM:

- Belum adanya pedoman untuk instansi/stakeholder internal/eksternal dalam pengelolaan fasilitas penimbangan dan penilaian kinerja;
- Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Belum seragamnya kelengkapan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada masing - masing UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan realisasi IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM Triwulan II Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 0 % .

Sehingga :

Rumus:

$$\text{UPPKB} = (\text{Kapasitas layanan sesuai SPM} / \text{Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan}) \times 100\%$$

Perhitungan:

$$\text{UPPKB} = (0 / 3.248.500) \times 100\% = \mathbf{0,000\%}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Capaian = Realisasi / Target

Capaian = 0 / 60

Capaian = 0 %

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM adalah

Tabel II 19 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang				
IKK 9.4.3.A. Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini ' 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan;	Rp3.368.000.000,-	Rp3.368.000.000,-	Rp21.000.000,-	0,62%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Percepatan dalam penyusunan dan pengesahan pedoman yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Berkoordinasi dengan Bagian SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM pada masing - masing UPPKB;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPM untuk selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pengusulan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang yang ada pada masing - masing UPPKB.

II.2.4.1 IKK 9.4.3.B Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 18 Capaian Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan

SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang		
IKK 9.4.3.B	Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan		Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	0,636	0,636	
Realisasi	0%	0,636	
Capaian	0,00%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

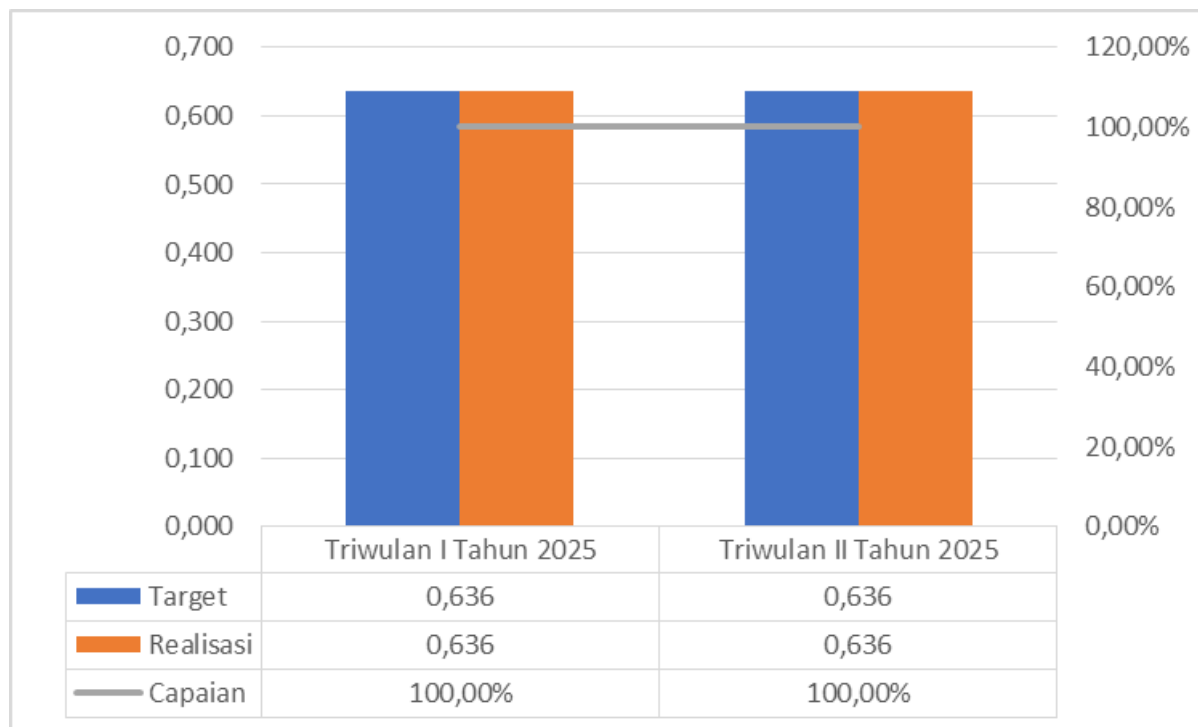
Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan merupakan perbandingan antara Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi / Jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan. Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan = Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi / Jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,636% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 0,636% maka capaian kinerja mencapai 100,00%.

Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 9.4.3.B Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan pada Triwulan II Tahun 2025).



Gambar II 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 9.4.3.B Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan pada Triwulan II Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

- Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

• **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

• **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan:

- Belum adanya pedoman untuk instansi/stakeholder internal/eksternal dalam pengelolaan fasilitas penimbangan dan penilaian kinerja;
- Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Belum seragamnya kelengkapan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada masing - masing UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas.

• **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan Triwulan II Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 0 % .

Sehingga :

Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan = Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi / Jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan

Rumus:

UPPKB = Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi / Jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan

Perhitungan:

UPPKB = $89/140 = 0,636$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Capaian = Realisasi / Target

Capaian = 0,636 / 0,636

Capaian = 100,00 %

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 adalah

Tabel II 19 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang				
IKK 9.4.3.B. Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 3. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor)	Rp13.368.000.000	Rp13.368.000.000	Rp55.266.758,-	0,004%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Percepatan dalam penyusunan dan pengesahan pedoman yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Berkoordinasi dengan Bagian SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM pada masing - masing UPPKB;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPM untuk selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pengusulan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang yang ada pada masing - masing UPPKB.

II.2.5 SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

II.2.5.1 IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 13 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: 1. IKK 13.1.3 A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. IKK 13.1.3 C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan anggaran . 4. IKK 13.1.3 D Indeks Pengelolaan aset dengan Tata Usaha disetiap Direktorat;

Tabel II 24 Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal					
IKK 13.1.3. A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38		
		Target		3,38	3,38
		Realisasi		3,382	3,382
		Capaian		100,06%	100,06%
IKK 13.1.3. B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3		
		Target		82,3	82,3
		Realisasi		82,76	82,76
		Capaian		100,56%	100,56%
IKK 13.1.3. C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,1		
		Target		94,1	94,1
		Realisasi		100	98,92
		Capaian		106,27%	105,12%
IKK 13.1.3. D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,2		
		Target		3,2	3,2
		Realisasi		0	0
		Capaian		0,00%	0,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
 IKK 13.1.3.A. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset

II.2.5.1 IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Keberhasilan pencapaian SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal pada IKK **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 25 Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal		
IKK 13.1.3. A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Satuan: Nilai	
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2
		Tahun 2025	
Target		3,38	3,38
Realisasi		3,382	3,382
Capaian		100,06%	100,06%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Tingkat Maturitas SPIP merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu instansi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa SPIP berjalan secara efektif, terdokumentasi, dilaksanakan, dan dipantau untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dengan adanya Maturitas SPIP, organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko secara lebih baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Manfaat Peningkatan Maturitas SPIP:

- Meminimalkan risiko kecurangan dan kesalahan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja.
- Memperkuat budaya pengendalian dan kepatuhan.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.

Capaian kinerja IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dihitung berdasarkan Capaian Nilai pada Lembar Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terlampir disampaikan Lembar Kerjanya:

Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

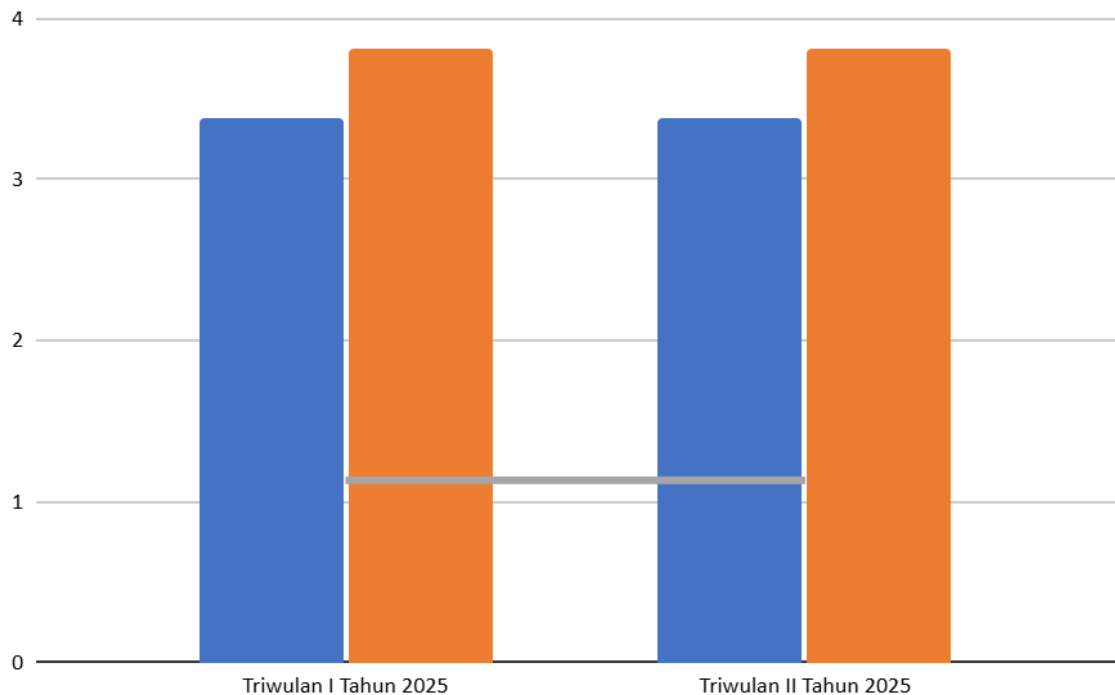
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI KEMENHUB PERHUBUNGAN Periode sampai dengan 30 Juni 2025						
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis		50,00%				
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis		50,00%				
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%				
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40,00%			
STRUKTUR DAN PROSES		3,75%				
Lingkungan Pengendalian		3,75%				
Pengakuan Integritas dan Nilai Etik (1.1)		3,75%				
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)		3,75%				
Kepemimpinan yang kondusif (1.3)		3,75%				
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)		3,75%				
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)		3,75%				
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (1.6)		3,75%				
Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif (1.7)		3,75%				
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		3,75%				
Penilaian Risiko						
Identifikasi risiko (2.1)		10,00%				
Analisis risiko (2.2)		10,00%				
Kegiatan Pengendalian						
Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan (3.1)		2,27%				
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		2,27%				
Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		2,27%				
Pengendalian Fisik Atas Aset (3.4)		2,27%				
Penetapan dan Reviu Atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)		2,27%				
Pemisahan Fungsi (3.6)		2,27%				
Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting (3.7)		2,27%				
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		2,27%				
Pembatasan Akses Atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)		2,27%				
Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)		2,27%				
Dokumen yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern Serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		2,27%				
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)		5,00%				
Komunikasi yang Efektif (4.2)		5,00%				
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		7,50%				
Evaluasi Terpisah (5.2)		7,50%				
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%			
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES						
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome		20,00%				
Capaian Output		10,00%				
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK		25,00%				
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset		25,00%				
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK		20,00%				
IEPK						
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%				
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%			
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						

IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tugas dan fungsi dari Subbagian Tata Usaha.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 3,382 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebesar 3,38 maka capaian kinerja adalah 100,06%. Pencapaian ini

digambarkan pada **Gambar II.8**. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP))



Gambar II 8 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP))

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Dalam melaksanakan IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Permenhub Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2016, tingkat maturitas SPIP diukur dari 5 unsur:

- Lingkungan Pengendalian

- Penilaian Risiko
- Kegiatan Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan Pengendalian Intern

Berdasarkan **Pedoman Penilaian Maturitas SPIP**, terdapat **5 tingkat kematangan**:

Level	Deskripsi
Level 1	Tidak Terdokumentasi
Level 2	Terdokumentasi
Level 3	Dilaksanakan Sesuai Dokumen
Level 4	Dipantau dan Dievaluasi
Level 5	Berkelanjutan

Target minimal secara nasional adalah **Level 3 (Terdefinisi/Dilaksanakan)**.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 yang masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan .

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan kurang memberikan perhatian dan tidak menempatkan SPIP sebagai prioritas.
2. Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen risiko, pengendalian intern, dan evaluasi SPIP.
3. Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan pengendalian.
4. Kapasitas dan jumlah APIP terbatas, sehingga pembinaan SPIP kurang maksimal.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor – faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

1. Dukungan penuh dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi organisasi dalam penerapan SPIP.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengendalian intern, manajemen risiko, dan pengawasan.
3. Tersusunnya kebijakan, prosedur, peta risiko, dan dokumen pendukung penerapan SPIP secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan dan pemantauan pengendalian intern.
5. Terbangunnya budaya sadar risiko dan kepatuhan di seluruh unit kerja, dimana setiap pegawai memahami dan menerapkan pengendalian intern dalam tugas sehari-hari.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap Direktorat Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 3,382 sehingga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 sudah sesuai dengan target PK Tahun 2025.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, capaian kinerja IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3,382}{3,38} \times 100\% = 100,06\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 adalah:

Tabel II 27 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen				
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal				
IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoirng Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area	Rp1.654.987.000	Rp1.654.987.000	Rp40.114.420	2,42%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mendorong Pimpinan untuk terlibat aktif dalam mengawal penguatan pengendalian intern.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis terkait SPIP, manajemen risiko, dan pengawasan.
3. Meningkatkan intensitas pengawasan intern dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian intern.
4. Memastikan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan dilaksanakan tepat waktu.
5. Memanfaatkan aplikasi untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan SPIP.

II.2.5.2 IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 18 Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal		
IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	82,3	82,3	
Realisasi	82,76	82,76	
Capaian	100,56%	100,56%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).

IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebuah indikator untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, Program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rumus Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB untuk tingkat Kementerian/Lembaga dan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk tingkat Eselon I setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Tabel II. Bobot Penilaian SAKIP

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Pelaporan Kinerja	10
5	Capaian Kinerja	20
	Total	100

Sumber: Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015

Adapun hasil interpretasi penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 21 Interpretasi Hasil Nilai SAKIP

No.	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
5.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu

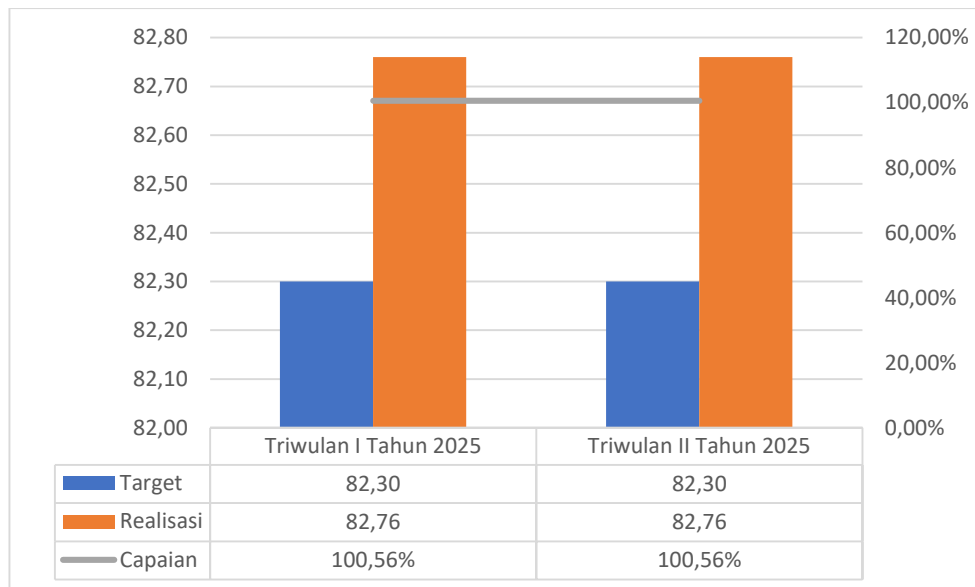
No.	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi
			banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
6.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Keterangan:

- nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori **AA (sangat memuaskan)**;
- nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori **A (memuaskan)**;
- nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori **BB (sangat baik)**;
- nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori **B (baik)**;
- nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori **CC (cukup)**; dan
- nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori **C (kurang)**; dan
- nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori **D (sangat kurang)**

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 82,76% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Tahun 2025 sebesar 82,3% maka capaian kinerja mencapai 100,56%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan II Tahun 2025).



Gambar II 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan II Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Dalam melaksanakan IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis SAKIP;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemenhub;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

• Narasi Kronologi Target

Target pada IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 yang masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

- **Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan kurang terlibat langsung dalam penerapan SAKIP secara konsisten.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM memahami secara optimal konsep, teknis penyusunan, dan pelaksanaan SAKIP.
3. Masih terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen SAKIP seperti perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 82,76, jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 82,3. Nilai SAKIP di Tahun 2025 atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 masih dalam proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 di tingkat Kementerian Perhubungan oleh Kemenpan RB.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, capaian kinerja IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82,76}{82,30} \times 100\% = 100,56\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung kinerja IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2025 adalah

Tabel II 19 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal				
IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Rp1.654.987.000,-	Rp1.654.987.000,-	Rp10.000.000,-	0,60%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan penyelarasan yang lebih baik antara rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), dan rencana kerja individu, sehingga tercipta keterkaitan yang logis antara tujuan, sasaran, indikator, dan program/kegiatan.
2. Memastikan pimpinan di semua level berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas.
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi kinerja berbasis digital untuk mendukung proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara efektif dan efisien.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

II.2.5.3 IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pencapaian Sasaran Kegiatan 13 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: 1. IKK 13.1.3 A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. IKK 13.1.3 C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan anggaran . 4. IKK 13.1.3 D Indeks Pengelolaan aset dengan Tata Usaha disetiap Direktorat;

Tabel II 24 Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal					
IKK 13.1.3. C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10		
		Target		94,10	94,10
		Realisasi		100	98,92
		Capaian		106,27%	105,12%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

II.2.5.3 IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 13: Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 25 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat

SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal		
IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	94,10	94,10	
Realisasi	100	98,92	
Capaian	106,27%	105,12%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

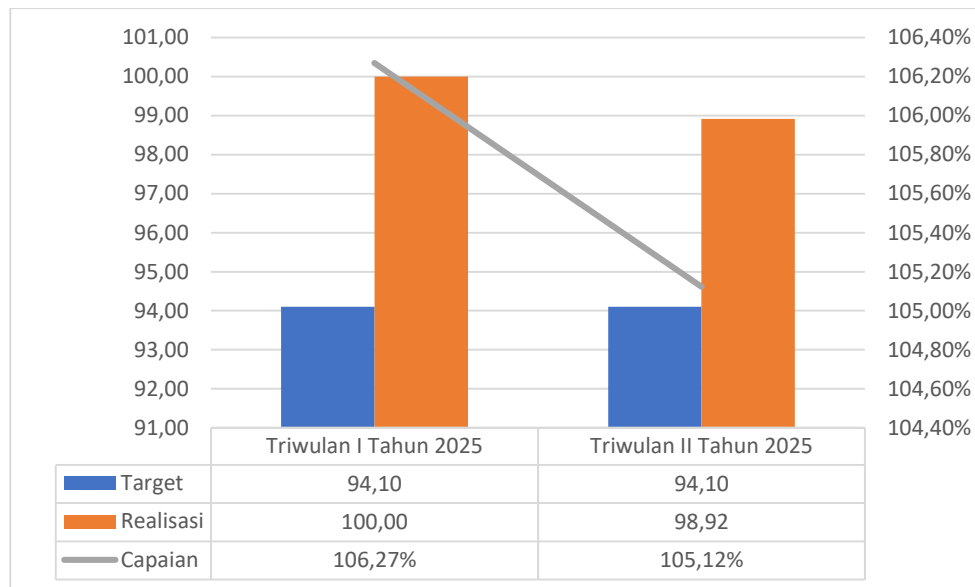
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan serta mengoptimalkan penggunaan prasarana transportasi jalan, diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak yang optimal, diperlukan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana realisasi penggunaan anggaran telah mencapai tujuan, sasaran, dan efisiensi yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam implementasinya membantu mengevaluasi apakah alokasi dana telah digunakan sesuai dengan perencanaan, memberikan manfaat optimal, serta meminimalkan pemborosan atau penyimpangan. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan perbaikan strategi penganggaran kedepannya. Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya target program dengan penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat guna, juga pencapaian hasil maksimal dengan memperhatikan efisiensi biaya. Kegiatan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan berkontribusi pada peningkatan konektivitas, pelayanan, keselamatan serta dukungan teknis kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 98,92 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 94,10 maka capaian kinerja mencapai **105,12%**. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Peningkatan kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.



Gambar II 8 Peningkatan kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2020 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.01/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.02/2021 tentang Indikator Kinerja dalam Penyusunan RKA-K/L;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

- **Narasi Kronologi Target**

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya penyempurnaan Renstra yang masih disusun. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kondisi atau kebijakan terbaru. Berikut adalah rincian perubahan/Revisi Perjanjian

Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya Blokir Anggaran (*Automatic Adjustment*).
2. Perubahan Kebijakan Pimpinan.
3. Ketidaksesuaian realisasi dengan target yang ditetapkan.
4. Penyelesaian tagihan tidak tepat waktu.
5. Meningkatnya dispensasi SPM.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor – faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya kesesuaian realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan.
- b. Penyelesaian tagihan tepat waktu.
- c. Pertanggungjawaban UP/TUP tepat waktu.

- Narasi Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 98,92 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 94,5. Realisasi kinerja diperoleh melalui data dari monevpa :


 FILTER: **SAMPAI DENGAN | JUNI**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT
1	133	022	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	Nilai	100.00	92.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00
					Nilai Aspek	96.39		100.00				100.00

NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
98.92	100%	0.00	98.92

- Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, capaian kinerja IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{98,92}{94,10} \times 100\% = 105,12\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 adalah:

Tabel II 27 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen				
SK 13. Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal				
IKK 13.1.3.C. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2.Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 5 Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	Rp1.309.974.000,-	Rp1.309.974.000,-	Rp1.050.266.800,-	98,89%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun Prognosa/Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan lebih baik dan realistis.
2. Memastikan tagihan dan pendaftaran kontrak tepat waktu.
3. Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan-kegiatan yang menghambat capaian kinerja.

II.2.5.4 IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Indeks Pengelolaan Aset ,dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 18 Capaian Indeks Pengelolaan Aset

SK 9	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal		
IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset		Satuan: %
Target/Realisasi/ Capaian	Q1	Q2	Tahun 2025
Target	3,20	3,20	
Realisasi	3,49	3,49	
Capaian	109,06%	109,06%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pengelolaan aset merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Aset, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan maupun sarana pendukung lainnya, merupakan sumber daya strategis yang dimiliki oleh organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang tertib, efektif, dan efisien menjadi keharusan untuk memastikan bahwa aset dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya serta terjaga nilai dan keberlanjutannya.

Pengelolaan aset dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan atau pemindahtanganan aset. Seluruh proses pengelolaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau penurunan nilai aset akibat pengelolaan yang tidak tepat.

Selain sebagai upaya memenuhi kewajiban administratif, pengelolaan aset yang tertib juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi. Aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial yang lebih besar,

mendukung efektivitas pelayanan, dan menghemat anggaran melalui perawatan yang tepat serta pemanfaatan yang optimal. Melalui penguatan pengelolaan aset, diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata, efisien, dan mendukung tercapainya visi dan misi. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja IKK Indikator Pengelola Aset dihitung berdasarkan Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN (15%) + Realisasi PNBPN di Bidang Pengelolaan Aset (10%) + Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN (10%) + Asuransi BMN (10%) + Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN (15%) + Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (10%) + BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) + Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan (15%).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Indeks Pengelolaan Aset sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,00 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,20 maka capaian kinerja mencapai **0,00%**. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:

Indeks Pengelolaan Aset pada Triwulan II Tahun 2025.



Gambar II 26 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3 D Indeks Pengelolaan Aset pada Triwulan II Tahun 2025.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Dalam melaksanakan IKK Indeks Pengelolaan Aset, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- **Narasi Kronologi Target**

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya penyempurnaan Renstra yang masih disusun. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kondisi atau kebijakan terbaru.

- **Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Indeks Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

1. Terlambatnya penyampaian LPB, Wasdal dan RKBMN.
2. BMN belum ditetapkan status penggunaannya.
3. Tidak dilakukan tindaklanjut atas BMN yang rusak berat.

- **Faktor Keberhasilan**

Faktor – faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK Indeks Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian LPB, Wasdal dan RKBMN Tepat Waktu.
2. Seluruh BMN telah ditetapkan status penggunaannya.
3. Telah ditindaklanjuti atas BMN yang rusak berat maupun yang telah terbit Berita Acara Pemindahtanganannya.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja IKK Indeks Pengelolaan Aset sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,20. Realisasi kinerja diperoleh melalui data dan perhitungan berikut:

Sehingga :

- Tindaklanjuti temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN telah dilaksanakan tetapi belum 100%.
- Penyampaian Laporan Wasdal dan LBP tepat waktu.
- Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap asset Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah mencapai 100%.
- Perhitungan Realisasi IKK Indeks Pengelolaan Aset sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Indeks Pengelolaan aset =

Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN (15%) + Realisasi PNPB di Bidang Pengelolaan Aset (10%) + Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan + Asuransi BMN (10%) + Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN + Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (10%) + BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%)

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan aset dengan triwulan II Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{3,20} \times 100\% = 0,00\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 adalah

Tabel II 19 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW II	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal				
IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : - Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Rp215.000.000,-	Rp215.000.000,-	Rp0,-	0,00%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memperkuat komitmen dari pimpinan serta seluruh jajaran unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan aset.
2. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait tata cara pengelolaan BMN yang baik dan benar.
3. Pemanfaatan teknologi Informasi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi data aset.

II.2.6 SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran

II.2.6.1 IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

• Uraian Kegiatan

Pencapaian SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

Tabel II 24 Sasaran Kegiatan 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2
SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran					
IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51		
		Target		85,51	85,51
		Realisasi		0	0
		Capaian		0,00%	0,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

II.2.6 IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

Keberhasilan Pencapaian SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 25 Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip

SK 13	Meningkatnya Layanan Perkantoran		
IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip		Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2
Target		85,51	85,51
Realisasi		0	0
Capaian		0,00%	0,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Definisi kinerja digitalisasi arsip adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses digitalisasi arsip telah dilaksanakan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat evaluasi terhadap pencapaian program digitalisasi arsip, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun dampak terhadap pengelolaan arsip secara keseluruhan. Digitalisasi arsip di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menggunakan sistem Integrasi kearsipan (SRIKANDI).

Capaian kinerja IKK Tingkat Digitalisasi Arsip dihitung berdasarkan Jumlah naskah masuk + jumlah naskah keluar yang telah diberkaskan terhadap Total jumlah naskah masuk + naskah keluar tahun berjalan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Tingkat Digitalisasi Arsip sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0,00 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 85,51, maka capaian kinerja mencapai 0,00%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:

Gambar II.9. Tingkat Digitalisasi Arsip



Gambar II 8 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan IKK Tingkat Digitalisasi Arsip, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan di Indonesia;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 adalah peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia;
- d. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

- **Narasi Kronologi Target**

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya penyempurnaan Renstra yang masih disusun. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kondisi atau kebijakan terbaru.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Tingkat Digitalisasi Arsip di setiap Direktorat Tahun 2025:

1. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet dalam memaksimalkan kinerja layanan perkantoran;
2. Terhambatnya Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan yang disebabkan oleh hilangnya sejarah atau *history* aset tercatat untuk aset di bawah tahun 2017;
3. Adanya peralihan dari manual ke digitalisasi arsip sehingga membutuhkan penyesuaian dalam mengimplementasikan digitalisasi arsip di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
4. Pegawai belum tertib dalam pengelolaan arsip dan belum memahami pentingnya alih media arsip ke digital.
5. Kurangnya pelatihan terkait tata cara alih media, metadata, dan sistem pengelolaan arsip elektronik.
6. Koneksi internet lambat menyebabkan akses untuk membuka aplikasi SRIKANDI menjadi lama/error.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemilahan dan pengiriman arsip inaktif Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ke Gedung Pusat Arsip Kementerian Perhubungan, di Soreang, Bandung pada Tahun 2025;
2. Seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah menggunakan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang merupakan aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya modernisasi dan digitalisasi pengelolaan arsip di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk mengintegrasikan sistem kearsipan dinamis antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola arsip yang lebih efisien, transparan, aman, dan akuntabel.

3. Terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam penatausahaan dan pengelolaan aset BMN, meliputi :
 - d. Telah dilakukan penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan/tidak relevan sesuai dengan Berita Acara Kemanfaatan;
 - e. Telah dilakukan penghapusan BMN melalui skema penjualan berupa Kendaraan Dinas Operasional yang memiliki kondisi rusak berat;
 - f. Penetapan Status Penggunaan BMN telah mencapai 100% pada triwulan 3 tahun 2024;

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan IKK Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 0 sehingga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 masih belum sesuai dengan target PK Tahun 2025.

Sehingga :

$$\frac{\text{Jumlah naskah masuk} + \text{jumlah naskah keluar yang telah diberkaskan}}{\text{Total jumlah naskah masuk} + \text{naskah keluar tahun berjalan}}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{95,51} \times 100\% = 0\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 adalah:

Tabel II 27 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen				
SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran				
IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip Dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut : 1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Rp 1.309.974.000,-	Rp 1.309.974.000,-	Rp 77.073.180,-	5,88%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan evaluasi rutin / pemantauan berkala terhadap progres digitalisasi (jumlah arsip terdigitalisasi, kualitas file, aksesibilitas).
2. Mengedukasi seluruh pegawai tentang pentingnya digitalisasi dan keteraturan arsip.
3. Mengoptimalkan peran arsiparis dalam proses pendigitalan dan pengawasan mutu arsip.

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1 Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp 67.733.026.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 28 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	49.639.364.000	73,29%
PNBP	Rp.	18.093.662.000	26,71%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	Rp.	67.733.026.000	100%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Sumber Dana pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp 67.733.026.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 29 Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan II TA. 2025

RM	Rp.	49.639.364.000	73,29%
PNBP	Rp.	18.093.662.000	26,71%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	Rp.	67.733.026.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp 67.733.026.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II 30 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	51.371.356.000	88,10%
Belanja Modal	Rp.	16.361.670.000	11,90%
Total	Rp.	67.733.026.000	100%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Jenis Belanja Triwulan II T.A. 2025 adalah sebesar **Rp 67.733.026.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 31 Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan II TA. 2025

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	50.274.796.000	74,22%
Belanja Modal	Rp.	17.458.230.000	25,78%
Total	Rp.	67.733.026.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran pada Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan Surat Edaran Plt. Dirjen Perhubungan Darat nomor KU.001/1/19/DJPD/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Efisiensi Anggaran TA. 2025 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

II.3.1.2. *Refocussing/Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2025

Terdapat kebijakan *Efisiensi* Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai surat DJA sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-293/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi-4);
2. Surat Edaran Plt. Dirjen Perhubungan Darat nomor KU.001/1/19/DJPD/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Efisiensi Anggaran TA. 2025 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.001/2/9/DJPD/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Layanan Keperintisan Subsidi TA 2025 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Pada Tahun 2025 terdapat Revisi Anggaran dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp67.733.026.000,-

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II 32 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	49.639.364.000	18.093.662.000	-	67.733.026.000
REVISI KE-1	49.639.364.000	18.093.662.000	-	67.733.026.000
REVISI KE-2	49.639.364.000	18.093.662.000	-	67.733.026.000
REVISI KE-3	49.639.364.000	18.093.662.000	-	67.733.026.000
REVISI KE-4	49.639.364.000	18.093.662.000	-	67.733.026.000

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II 33 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PECAHAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	51.371.356.000	16.361.670.000	67.733.026.000
REVISI KE-1	-	50.274.796.000	17.458.230.000	67.733.026.000
REVISI KE-2	-	50.274.796.000	17.458.230.000	67.733.026.000
REVISI KE-3	-	50.274.796.000	17.458.230.000	67.733.026.000
REVISI KE-3	-	50.274.796.000	17.458.230.000	67.733.026.000

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

Tabel II 34 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	51,371,356,000	1,096,560,000	50,274,796,000
Belanja Modal	16,361,670,000	- 1,096,560,000	17,458,230,000
TOTAL	67,733,026,000	-	67,733,026,000

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	50,274,796,000	-	50,274,796,000
· RM	45,328,694,000	-	45,328,694,000
· PNBPN	4,946,102,000	-	4,946,102,000
Belanja Modal	17,458,230,000	-	17,458,230,000
· RM	4,310,670,000	-	4,310,670,000
· PNBPN	13,147,560,000	-	13,147,560,000
TOTAL	67,733,026,000	-	67,733,026,000

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel II 35 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	46.489.102.000	46.489.102.000	1.896.115.900	4.08%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	46.489.102.000	46.489.102.000	1.896.115.900	4.08%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	21.243.924.000	21.243.924.000	2.321.009.972	3.71%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	610.670.000	610.670.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	20.633.254.000	20.633.254.000	2.321.009.972	11.25%
GRAND TOTAL		67.733.026.000	67.733.026.000	4.217.125.872	6,23%

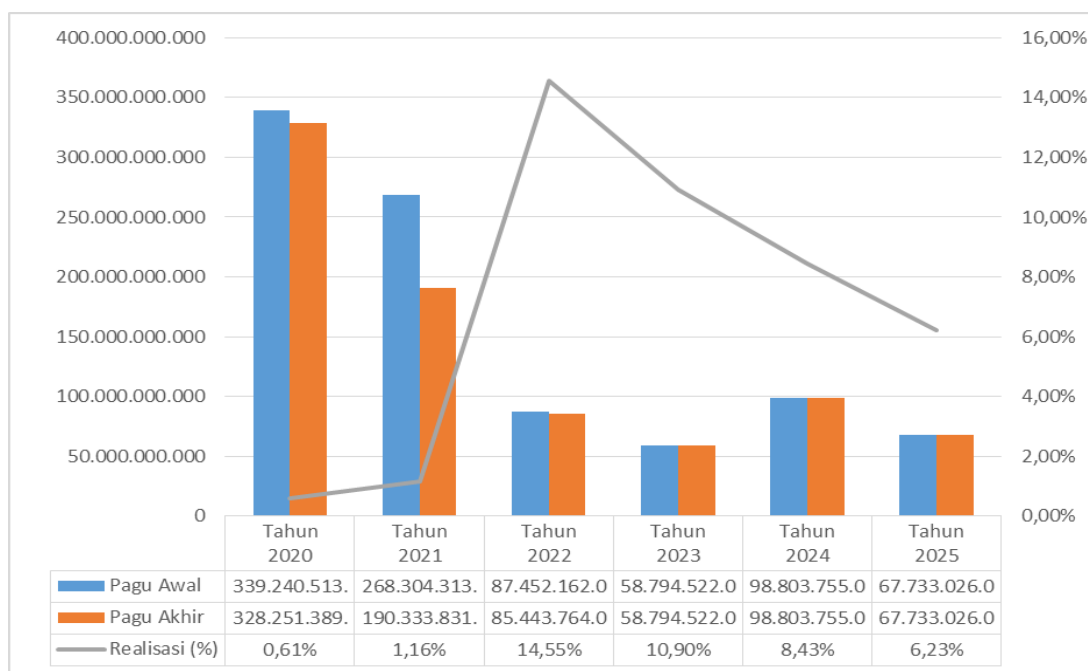
Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 36 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020 – Tahun 2025 (Triwulan II)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	339,240,513,000	328,251,389,000	1,995,574,265	0.61%
2	2021	268,304,313,000	190,333,831,000	2,206,877,874	1.16%
3	2022	87,452,162,000	85,443,764,000	12,436,021,120	14.55%
4	2023	58,794,522,000	58,794,522,000	6,411,455,940	10.90%
5	2024	98,803,755,000	98,803,755,000	8,329,839,080	8.43%
6	2025	67.733.026.000	67.733.026.000	4.217.125.872	6,23%



Gambar II 9 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020 – Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp 1.995.574.265,- atau mencapai 0,61% dari pagu akhir Rp 328.251.389.000,-. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat serapan anggaran Triwulan II Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2206877874,- atau mencapai 1.16% dari pagu akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 190.333.831.000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran Triwulan II Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 12.436.021.120,- atau mencapai 14.55% dari pagu akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp 85.443.764.000,-. Pada Tahun 2023 tingkat serapan anggaran Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 6.411.455.940,- atau mencapai 10,90% dari pagu akhir Triwulan II Tahun 2023 yaitu

sebesar Rp 58.794.522.000,-. Pada Tahun 2024 tingkat serapan anggaran Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 8.329.839.080,- atau mencapai 8,43% dari pagu akhir Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 98.803.755.000,-. Pada Tahun 2025 tingkat serapan anggaran Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 4.217.125.872,- atau mencapai 6,23% dari pagu akhir Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 67.733.026.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II 37 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
022.03.G A	Program Infrastruktur Konektivitas	46.489.102.000	46.489.102.000	1.896.115.900	1.896.115.900
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	46.489.102.000	46.489.102.000	1.896.115.900	1.896.115.900
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	21.243.924.000	21.243.924.000	2.321.009.972	2.321.009.972
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	610.670.000	610.670.000	0	0
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	20.633.254.000	20.633.254.000	2.321.009.972	2.321.009.972
GRAND TOTAL		67.733.026.000	67.733.026.000	1.778.298.175	4.217.125.872

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp1.778.298.175,- atau sebesar 2,63%.

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Per Jenis Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 38 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	50.274.796.000	4.217.125.872	8.39%
3	Belanja Modal	17.458.230.000	-	0,00%
TOTAL		67.733.026.000	4.217.125.872	6.23%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 dari Triwulan II sebesar Rp 4.217.125.872,- atau sebesar 6,23%.

II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Tabel II 39 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	49.639.364.000	4.217.125.872	8.50%
2	PNBP	18.093.662.000	-	0,00%
3	SBSN	-	-	0,00%
TOTAL		67.733.026.000	4.217.125.872	6.23%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2025 dari Triwulan II sebesar Rp 4.217.125.872,- atau sebesar 6,23%.

II.3.2.4 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Total pagu untuk Triwulan II Tahun 2025 di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Rp67.733.026.000,- (Enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah). Hingga tanggal 30 Juni 2025, pagu akhir sebesar Rp67.733.026.000,- telah terealisasi sebesar Rp 4.217.125.872,- (6,23%) dimana masih terdapat pagu blokir yang saat ini menunggu adanya relaksasi anggaran.

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II. 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 40 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan II		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
1	SK3 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	108,92%	0,53%	108,39%
2	SK4 Meningkatkan rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	0,00%	7,00%	-74,22%
3	SK02 Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	45,00%	3,00%	40,79%
4	SK9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	50,00%	1,26%	48,74%
5	SK13 Meningkatkan Layanan Manajemen SDM Internal	104,13%	13,00%	36,73%
6	SK 14 Meningkatkan Layanan Perkantoran	40,35%	12,59%	17,41%
Total		58,07%	6,23%	51,84%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui per Triwulan II Tahun 2025 bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 58,07%, dengan realisasi anggaran sebesar 6,23% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 51,84%.

II. 3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel II 41 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan II				
		Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan II)
1	SK3 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	21	20	95%	108,92%	13,68%
2	SK4 Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	20	16	80%	0,00%	-80,00%
3	SK02 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	20	16	80%	45,00%	-35,00%
4	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	25	20	80%	50,00%	-30,00%
5	SK13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	15	10	67%	104,13%	37,46%
6	SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran	15	10	67%	40,35%	-26,32%
Total		116	92	78%	58,07%	-20,03%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 58,07%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar -20,03%.



BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2025, ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 4 (empat) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari 12 (dua belas) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 7 (tujuh) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 5 (lima) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar **0,928** (target Tahun 2025 sebesar 0,852), dengan capaian kinerja sebesar **108,92%**;
2. Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM terealisasi sebesar **90,47** (target Tahun 2025 sebesar 90,47), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
3. Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan terealisasi sebesar **0,636** (target Tahun 2025 sebesar 0,636), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terealisasi sebesar **3,382** (target Tahun 2025 sebesar 3,38 dengan capaian kinerja sebesar **100,06%**);
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terealisasi sebesar **82,76** (target Tahun 2025 sebesar 82,30), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
6. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran terealisasi sebesar **98,92** (target Tahun 2025 sebesar 94,10), dengan capaian kinerja sebesar **105,12%**;

Indikator Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$) :

1. Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 0,077), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;
2. Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 60), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;
3. Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman terealisasi sebesar **21** (target Tahun 2025 sebesar 60), dengan capaian kinerja sebesar **35%**;
4. Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 60), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;

5. Indeks Pengelolaan Aset terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 3,20), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;
6. Tingkat Digitalisasi Arsip terealisasi sebesar **0** (target Tahun 2025 sebesar 75), dengan capaian kinerja sebesar **0,00%**;

Kapasitas Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 46,73% dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 54,14%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan belum cukup terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 – 2029 dan membutuhkan langkah-langkah evaluasi untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja agar sesuai dengan target yang ditetapkan.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

Total pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan II T.A. 2025 adalah sebesar Rp 67.733.026.000,- dengan realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 4.217.125.872;

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
2. melakukan koordinasi kebijakan terpadu dalam perencanaan dan pengembangan fasilitas pendukung dan sistem integrasi moda;
3. evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan;
4. standarisasi pelayanan sesuai regulasi yang tersusun pada pelayanan angkutan umum massal perkotaan
5. Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A melalui pembangunan terminal baru, revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
6. Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal Tipe A melalui peningkatan fasilitas melalui revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal Tipe A misalnya dengan pelaksanaan *excellent service* untuk meningkatkan minat pengguna terminal maupun operator bus untuk menaik-turunkan penumpang di terminal.
8. Melakukan koordinasi secara intensif dan berkala dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait muatan dalam penyusunan dokumen penyiapan KPBU;
9. Melakukan bimbingan teknis ataupun training bagi SDM yang berkompeten;
10. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
11. Melakukan koordinasi secara intensif dan berkala dengan stakeholder terkait terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ;
12. Melakukan bimbingan teknis ataupun training bagi SDM yang berkompeten;
13. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang
14. Percepatan dalam penyusunan dan pengesahan pedoman yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

15. Berkoordinasi dengan Bagian SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM pada masing - masing UPPKB;
16. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPM untuk selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pengusulan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang yang ada pada masing - masing UPPKB.
17. Meningkatkan kualitas SDM ataupun training bagi SDM yang berkompeten dalam mendukung optimalisasi pengelolaan dan digitalisasi Arsip;
18. Perlunya kesadaran hak dan kewajiban pegawai dalam menggunakan Barang Milik Negara;
19. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
20. Melakukan review secara berkala terkait Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 sesuai dengan hasil finalisasi pembahasan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

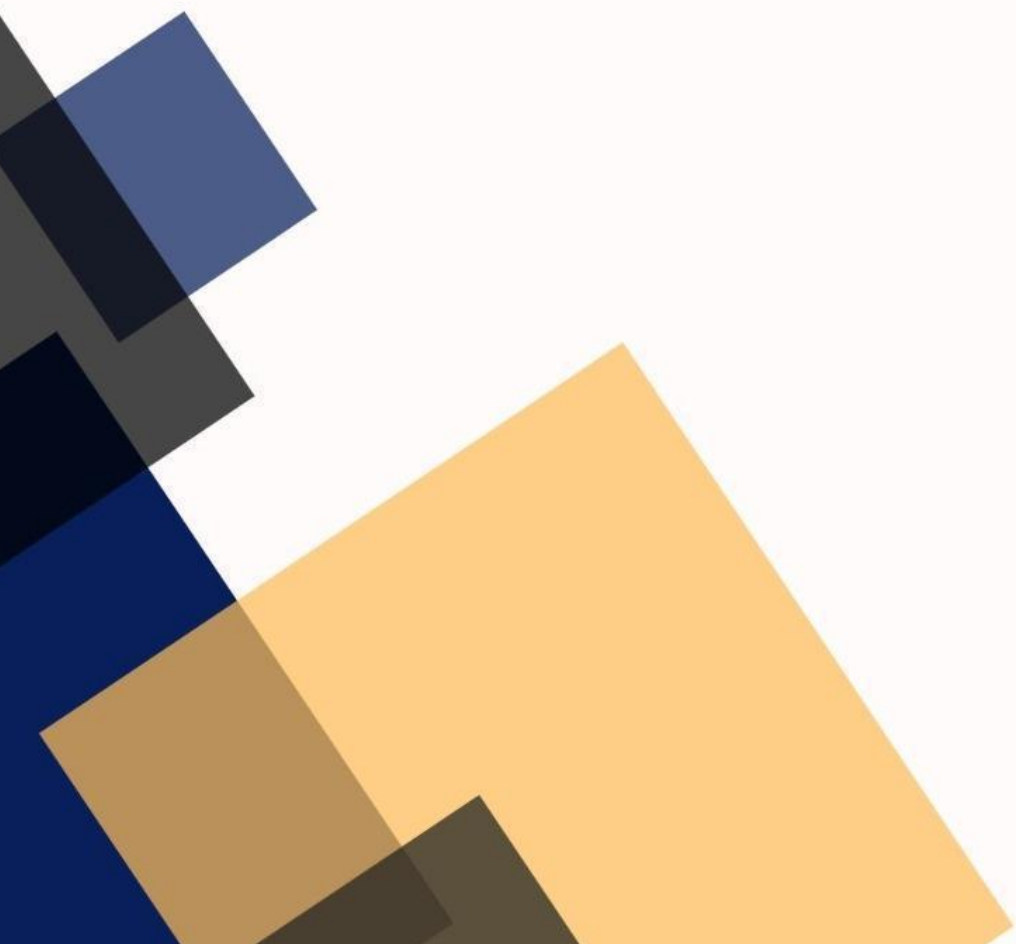
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	0.852	0,928	108,92%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan layanan pengoperasian terminal sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077	0,077	0	0,00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan pengoperasian layanan terminal barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Barang
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47	90,47	90,47	100,00%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	60	0	0,00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait dokumen penyiapan KPBU rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	60	21	35,00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait kegiatan kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman pada tahun rencana dan eksisting	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)
											Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	60	0	0,00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan inventarisasi dan movev atas pelaksanaan SPM pada fasilitas penimbangan; 2. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan adanya pedoman SPM kepada seluruh pengelola fasilitas penimbangan; Kendala: Belum adanya sosialisasi karena saat ini pedoman SPM masih dalam	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636	0,636	0,636	100,00%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan pengoperasian fasilitas penimbangan serta melakukan identifikasi akan adanya tantangan dan hambatan agar dapat dilakukan percepatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan	Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	3,38	3,382	100,06%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : :Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3	82,3	82,76	100,56%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melengkapi data dukung dan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,1	94,1	98,92	104,65%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan monitoring secara periodik atas indikator - indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perhitungan Nilai IKPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			6IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,2	3,2	0	111,25%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan dan optimalisasi dalam kegiatan pengelolaan aset	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85.51	85.51	0	40,35%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisi kepada seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan2. Melakukan pengelolaan ARSIP dan mengirimkan ARSIP ke gedung arsip dalam rangka penyusutan arsip3.	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)
											Melakukan monitoring secara periodik atas indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target IKK yang telah ditetapkan	



LAMPIRAN





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PARAF PERSETUJUAN	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	-		Subdit Faspim
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	15		Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 03	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100		Subdit Kepengusahaan Prasarana
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	-		Subdit Kepengusahaan Prasarana
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60		Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75		Seluruh Subdit dan Tata Usaha
								
								
								

Jakarta, 3 Desember 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	-
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	15
			IKK 03	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	-
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Jakarta, 3 Desember 2024

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

2025



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T.	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	2 / 2025 1	
2.	Diperiksa	Susiani, A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	2 / 2025 1	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	3 / 2025 1	
4.	Disetujui	Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	3 - 1 - 2025	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Destiana Herawati, S.SiT	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	2 - 1 - 2025	
2.	Diperiksa	Hariyanto, ST	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	2 / 1 / 2025	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3 / 1 / 2025	
4.	Disetujui	Windi Susilawati, ST, MT	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	3 / 1 / 2025	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.Tr.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	2-1-2025	
2.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	3-1-2025	
3.	Diperiksa	Fitroh, S.ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	3-1-2025	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	3-1-2025	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	2-1-2025	
2.	Diperiksa	Jekky Hendri, S.Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	3-1-2025	
3.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2-1-2025	
4.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	3-1-2025	



PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	2-1-2025	
2.	Diperiksa	Yulie Wulandari, SE	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	3-1-2025	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	3-1-2025	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Pertama

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60
			IKK 03	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	60
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp04	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Kegiatan

Anggaran

1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp.	46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000,00

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jakarta, 3 Januari 2025
Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Lampiran I Nota Dinas Direktur Prasarana Transportasi
Jalan

Nomor : PL.107/1/14/DPTJ/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan terbitnya DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan periode Tahun Anggaran serta Rencana Strategis periode 2025-2029 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp46.489.102.000,00 dan Program Dukungan Manajemen masih dengan dengan pagu sebesar Rp21.243.924.000,00.

**TABEL SEMULA MENJADI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024 (Baseline)	Realisasi 2024	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	-	-	-	60	- Target Awal IKK 02 tahun 2025 belum ada, karena belum ada SPM Faspim. - Penyesuaian Target pada tahun 2025 dilakukan karena sudah ada output faspim, sehingga immediate outcome menggunakan kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai spesifikasi teknis dengan target 60% kapasitas operasi faspim memenuhi standar atau pedoman teknis. - Jika SPM sudah

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024 (Baseline)	Realisasi 2024	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
										ada, immediate outcome menggunakan kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM.
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	-	-	15	60	Rasio pemenuhan SPM terminal tipe A diubah menjadi 60% pada tahun 2025
			IKK 03	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	-	-	100	100	Dokumen penyiapan KPBU yang diterima oleh simpul KPBU menjadi prasyarat untuk tindak lanjut pelaksanaan KPBU.
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	-	-	-	60	- Target awal IKK 04 tahun 2025 belum ada, karena belum ada pedoman kerjasama perusahaan prasarana LLAJ. - Penyesuaian target pada tahun 2025 dilakukan karena sudah ada output kerjasama perusahaan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024 (Baseline)	Realisasi 2024	Target Renstra 2025	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
										prasarana LLAJ. - Jika pedoman kerjasama perusahaan belum ada, Immediate outcome menggunakan jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai rencana - Target IKK 04 tahun 2025 diubah menjadi 60%
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	-	-	25	60	Belum ada kajian rencana lokasi dan kebutuhan tempat istirahat, standar teknis, dan SPM tempat istirahat, target IKK 26 pada tahun 2025 belum ada.
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	Nilai	-	-	75	75	Target sama dengan Renstra

Lampiran II Nota Dinas Direktorat Prasarana
Transportasi Jalan

Nomor : PL.107/1/14/DPTJ/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 01	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	Subdit Faspim;
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	1.Subdit TAJ; 2.Subdit KP.
			IKK 03	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100	
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	60	
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	Subdit PKB
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	Nilai	75	Seluruh Subdit



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

**Kepala Sub Direktorat
Terminal Angkutan Jalan**

2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan

RUDY ARYA ISKANDAR, S.T., M.Sc.
NIP. 19780621 200312 1 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

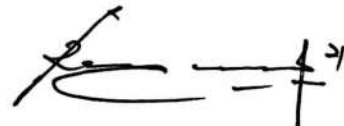
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60
2	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Disetujui
Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T
NIP. 19700910 199703 1 002

Jakarta, 3 Januari 2025
Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan



RUDY ARYA ISKANDAR, S.T., M.Sc.
NIP. 19780621 200312 1 000



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

**Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan
Bermotor**

2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Susilawati, ST, MT

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor

WINDI SUSILAWATI, ST, MT
NIP. 19780307 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60
2	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Disetujui

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Jakarta, 3 Januari 2025

Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor



WINDI SUSILAWATI, ST, MT
NIP. 19780307 200812 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

**Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung Dan
Integrasi Moda**

2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Widiani, A.Md LLAJ, SE

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE
NIP. 19740706 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

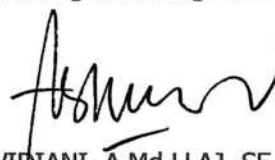
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60
2	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Disetujui
Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Jakarta, 3 Januari 2025
Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE
NIP. 19740706 199703 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

**Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana**

2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susanty Pertiwi, S.S, M.Hum.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana

SUSANTY PERTIWI, S.S, M.Hum.
NIP. 19740720 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama perusahaan prasarana LLAJ	%	60
2	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Disetujui

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Jakarta, 3 Januari 2025

Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana



SUSANTY PERTIWI, S.S, M.Hum.
NIP. 19740720 199703 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

**Ketua Tim Kelompok Substansi
Tata Usaha**

2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KELOMPOK SUBSTANSI TATA USAHA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulie Wulandari

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2025

Pihak Kedua

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

Pihak Pertama

Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usah

YULIE WULANDARI
NIP. 19720716 199903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KELOMPOK SUBSTANSI TATA USAHA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

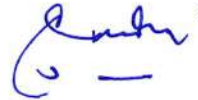
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1		2		3	4
SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	Nilai	75

Disetujui

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

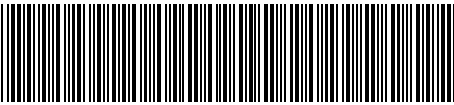
Jakarta, 3 Januari 2025

Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha



TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

YULIE WULANDARI
NIP. 19720716 199903 2 002



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 - 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
 - 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 - 4. Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 - Sebesar : Rp. 67.733.026.000 (ENAM PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	49.639.364.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	18.093.662.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 67.733.026.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

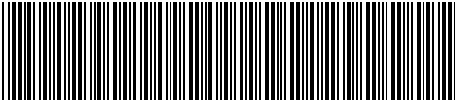
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025

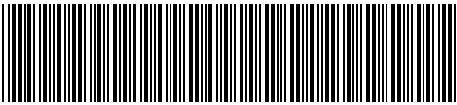


DS:8214-9202-4002-8004

Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	46.489.102.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	46.489.102.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.243.924.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I A. INFORMASI KINERJA



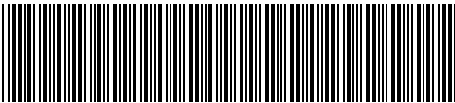
DS:8214-9202-4002-8004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : I A. 1

Program	:	022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			46.489.102.000		
Kegiatan	:	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			46.489.102.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.551.000.000	
Rincian Output	:	01	ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18.00	Rekomendasi Kebijakan	28.551.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32,00	Laporan, Rekomendasi	12.938.102.000	
Rincian Output	:	01	FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.00	Laporan	12.938.102.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000.000	
Rincian Output	:	01	PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1.00	Kajian	2.500.000.000	
			02	PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	1.00	Kajian	2.500.000.000
Program	:	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			21.243.924.000		
Kegiatan	:	4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat			610.670.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	610.670.000	
Rincian Output	:	01	EBB.906	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	6.00	unit	610.670.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8214-9202-4002-8004

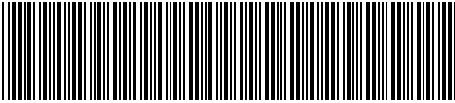
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Kegiatan	:	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			20.633.254.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat			
		2. 02	Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat			
		3. 03	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.547.254.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	5.547.254.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	15.086.000.000
Rincian Output	:	01 EBD.909	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	3.00	Laporan	15.086.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8214-9202-4002-8004

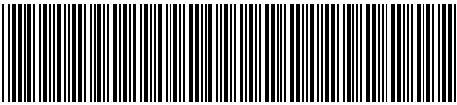
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	67.733.026.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	49.639.364.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	18.093.662.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



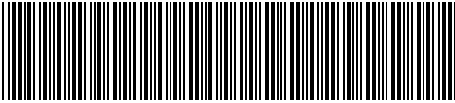
DS:8214-9202-4002-8004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	51.371.356	16.361.670	-	-	67.733.026	01 . 51	
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	30.738.102	15.751.000	-	-	46.489.102		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	30.738.102	15.751.000	-	-	46.489.102		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.800.000	15.751.000	-	-	28.551.000		
01	RM	-	8.700.000	3.700.000	-	-	12.400.000		
04	PNBP	-	4.100.000	12.051.000	-	-	16.151.000		
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.938.102	-	-	-	12.938.102		
01	RM	-	10.995.440	-	-	-	10.995.440		
04	PNBP	-	1.942.662	-	-	-	1.942.662		
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		
01	RM	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	133	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8214-9202-4002-8004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

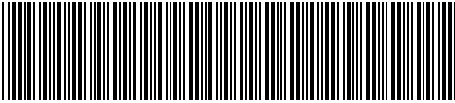
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	20.633.254	610.670	-	-	21.243.924	01 . 51	
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	-	-	610.670	-	-	610.670		
4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	610.670	-	-	610.670		
01 RM		-	-	610.670	-	-	610.670		
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	20.633.254	-	-	-	20.633.254		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.547.254	-	-	-	5.547.254		
01 RM		-	5.547.254	-	-	-	5.547.254		
4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	15.086.000	-	-	-	15.086.000		
01 RM		-	15.086.000	-	-	-	15.086.000		
JUMLAH		-	51.371.356	16.361.670	-	-	67.733.026		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8214-9202-4002-8004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

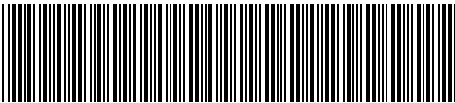
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.644.350	5.645.176	67.733.026
		BELANJA BARANG	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.280.886	4.281.610	51.371.356
		BELANJA MODAL	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.464	1.363.566	16.361.670
		022.03.GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.037	3.874.695	46.489.102
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.561.459	2.562.053	30.738.102
		53 BELANJA MODAL	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.578	1.312.642	15.751.000
		022.03.WA.4596 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.924	610.670
		53 BELANJA MODAL	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.886	50.924	610.670
		022.03.WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.557	20.633.254
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.427	1.719.557	20.633.254

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV A. B L O K I R



DS:8214-9202-4002-8004

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

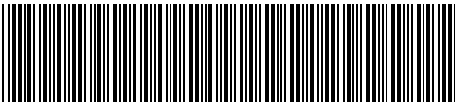
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
022.03.GA 4640	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.363.132	4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	52 Belanja Barang Rp. 4.363.132	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Program Infrastruktur Konektivitas		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000
	Penunjang Teknis Transportasi Darat		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.047.913		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
022.03.WA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 394.606		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 193.240		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.057.927		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 244.446		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8214-9202-4002-8004

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.
NRP. 66110433

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB(022)KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORG(03)Ditjen Perhubungan Darat

UNIT KERJA(352597)DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

ALOKASIRp. 67,733,026,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			46,489,102,000	
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			46,489,102,000	
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	18.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		28,551,000,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4640.ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	18.0 Rekomendasi Kebijakan		28,551,000,000	
501	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana			28,551,000,000	U
A	SUBDIT TERMINAL ANGKUTAN JALAN			7,651,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1,503,440,000	PNP
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Terminal Barang	1.0 Paket	516,640,000	516,640,000	
	- Penyusunan Simpul Terminal Barang Umum di Pulau Sumatera	1.0 Paket	786,800,000	786,800,000	
	- Penyusunan NSPK Bidang Terminal Angkutan Jalan	1.0 Paket	200,000,000	200,000,000	
536111	Belanja Modal Lainnya			6,147,560,000	PNP
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Wonogiri Provinsi Jawa Tengah	1.0 Paket	547,940,000	547,940,000	
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Surodakan Provinsi Jawa Timur	1.0 Paket	583,140,000	583,140,000	
	- Penyusunan DED Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Simpang Aur Provinsi Sumatera Barat	1.0 Paket	687,440,000	687,440,000	
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A KH Ahmad Sanusi Sukabumi Prov Jawa Barat	1.0 Paket	548,240,000	548,240,000	
	- Penyusunan DED Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.0 Paket	723,440,000	723,440,000	
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Rajekwesi Provinsi Jawa Timur	1.0 Paket	583,140,000	583,140,000	
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pemalang Provinsi Jawa Tengah	1.0 Paket	527,740,000	527,740,000	
	- Penyusunan DED Prototive Terminal Penumpang Tipe A Labuan Banten dan Pandaan Jawa Timur	1.0 Paket	528,440,000	528,440,000	
	- Penyusunan DED Prototive Terminal Penumpang Tipe A Titalayo Sulbar dan Sumer Payung NTB	1.0 Paket	588,440,000	588,440,000	
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Klari Prov Jawa Barat	1.0 Paket	539,800,000	539,800,000	
	- Penyusunan DED Penataan Ruang Terminal Tipe A Batu Ampar	1.0 Paket	289,800,000	289,800,000	
B	SUBDIT UPPKB			10,000,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1,500,000,000	PNP
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Penimbangan Kendaraan Bermotor	1.0 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1,500,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan Tata Kelola Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor	1.0 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan DLH dan Andalalin UPPKB Kalitirto, Kulwaru dan Taman Martani - Penyusunan DLH dan Andalalin UPPKB Trosobo dan Singosari - Penyusunan DLH dan Andalalin UPPKB Trowulan dan Sedarum - Penyusunan DLH dan Andalalin UPPKB Balai Raja dan Jailolo - Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB Seririt - Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB Kayumalue dan Tana Batue - Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB Beru-Beru dan Sarjo	3.0 Lok 2.0 Paket 2.0 Lok 2.0 Lok 1.0 Lok 2.0 Lok 2.0 Lok	500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000	7,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000	PNP
E	SUBDIT FASPIM			4,200,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	1.0 Paket	500,000,000	500,000,000	RM
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Batam - Penyusunan SID Kebutuhan Faspim Pada Kawasan dan Jalur Antar lintas batas Negara di Entikong - Penyusunan SID Kebutuhan Faspim Pada Kawasan dan Jalur Antar lintas batas Negara di Atambua di Nusa Tenggara Timur - Penyusunan SID Kebutuhan Integrasi moda di kawasan Gerbang Kerto Susilo dalam rangka	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	700,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000	3,700,000,000 700,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000	RM
F	SUBDIT KP			6,700,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Pedoman Kepengusahaan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat - Penyusunan Set Priority Business Plan UPPKB di Seluruh Indonesia - Penyusunan Dokumen Andalalin Proyek KPBU Terminal - Penyusunan Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terminal Arjosari Malang - Penyusunan Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terminal Induk Lumpue Pare-Pare - Penyusunan Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terminal Mandalika dan Sumer Payung Provinsi Nusa Tenggara Bara	1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket 1.0 Paket	1,500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000	6,700,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000	RM
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	32.0 Laporan, Rekomendasi		12,938,102,000	
4640.FAE.923	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32.0 Laporan		12,938,102,000	
923	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat			12,938,102,000	U
A	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan			310,601,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			47,056,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	47,056,000	47,056,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			56,886,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	56,886,000	56,886,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			206,659,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	206,659,000	206,659,000	*
B	<i>Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan</i>			311,706,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			51,360,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	51,360,000	51,360,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			61,190,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	61,190,000	61,190,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			199,156,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	199,156,000	199,156,000	*
C	<i>Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan</i>			322,196,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			55,415,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	55,415,000	55,415,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			65,245,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	65,245,000	65,245,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			201,536,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	201,536,000	201,536,000	*
D	<i>Bimbingan teknis Pengelolaan Terminal Tipe A</i>			245,876,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			35,160,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	35,160,000	35,160,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,362,000	
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	30,362,000	30,362,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			180,354,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	180,354,000	180,354,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Bimbingan teknis Pengelolaan Terminal Barang			200,084,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			24,228,000	PNP
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	24,228,000	24,228,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			24,268,000	PNP
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	24,268,000	24,268,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			151,588,000	A PNP
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	151,588,000	151,588,000	*
F	Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan			180,238,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			32,428,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	32,428,000	32,428,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			33,828,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	33,828,000	33,828,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			113,982,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	113,982,000	113,982,000	*
G	Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan			310,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			82,500,000	PNP
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	82,500,000	82,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			112,500,000	PNP
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	112,500,000	112,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			115,000,000	A PNP
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	115,000,000	115,000,000	*
H	Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan			201,280,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			26,000,000	PNP
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	26,000,000	26,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			26,331,000	PNP
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	26,331,000	26,331,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			148,949,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	148,949,000	148,949,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia			269,332,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			53,415,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	53,415,000	53,415,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			60,745,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	60,745,000	60,745,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			155,172,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	155,172,000	155,172,000	*
J	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor			580,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			157,510,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	157,510,000	157,510,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			65,270,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	65,270,000	65,270,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			357,220,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	357,220,000	357,220,000	*
K	Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor			385,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			86,362,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	86,362,000	86,362,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			48,721,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	48,721,000	48,721,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			249,917,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	249,917,000	249,917,000	*
L	Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor			515,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			219,520,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	219,520,000	219,520,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			57,423,000	RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	57,423,000	57,423,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119 M	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			238,057,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	238,057,000	238,057,000	*
	Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor			430,000,000	
521219 522151	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			137,280,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	137,280,000	137,280,000	
	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			47,295,000	RM
524119 N	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	47,295,000	47,295,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			245,425,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	245,425,000	245,425,000	*
521119 524111	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor			420,000,000	
	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			93,277,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	93,277,000	93,277,000	
521119 O	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			326,723,000	A
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	326,723,000	326,723,000	*
	Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor			320,000,000	
521119 521211	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			63,685,000	RM
	- Belanja Barang Operasional	1.0 Tahun	63,685,000	63,685,000	
	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			56,315,000	RM
524111 P	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	56,315,000	56,315,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			200,000,000	A
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	200,000,000	200,000,000	*
521219 524111	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan			300,000,000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			71,391,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	71,391,000	71,391,000	
Q	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			228,609,000	A
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	228,609,000	228,609,000	*
	Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua			300,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(03)
(352597)
Rp. 67,733,026,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Darat
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			90,597,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	90,597,000	90,597,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			209,403,000	A
	- Perjalanan Dinas	1.0 Tahun	209,403,000	209,403,000	*
R	<i>Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung Wilayah Perkotaan</i>			375,635,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			86,220,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	86,220,000	86,220,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			60,440,000	
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	60,440,000	60,440,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			78,975,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	78,975,000	78,975,000	*
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			150,000,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	*
S	<i>Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi</i>			296,660,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			86,220,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	86,220,000	86,220,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			60,440,000	
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	60,440,000	60,440,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			150,000,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	*
T	<i>Sosialisasi Penyediaan Fasilitas pendukung Integrasi Moda</i>			153,940,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			20,600,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	20,600,000	20,600,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			54,365,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	54,365,000	54,365,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			78,975,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	78,975,000	78,975,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
U	Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			153,560,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			20,220,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	20,220,000	20,220,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			54,365,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	54,365,000	54,365,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			78,975,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	78,975,000	78,975,000	*
V	Survei Identifikasi Potensi Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antarmoda dan Intermoda			185,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			20,640,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	20,640,000	20,640,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			47,360,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	47,360,000	47,360,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			117,000,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	117,000,000	117,000,000	*
W	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			200,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			35,640,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	35,640,000	35,640,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			47,360,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	47,360,000	47,360,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			117,000,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	117,000,000	117,000,000	*
X	Survei Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam Rangka Dukungan Angkutan Massal Perkotaan			185,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			20,640,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	20,640,000	20,640,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			47,360,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	47,360,000	47,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			117,000,000	A
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
Y	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	117,000,000	117,000,000	*
	<i>Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi</i>			200,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			35,640,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	35,640,000	35,640,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			47,360,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	47,360,000	47,360,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			117,000,000	A
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
Z	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	117,000,000	117,000,000	*
	<i>Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan</i>			295,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			50,000,000	PNP
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			45,525,000	PNP
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	45,525,000	45,525,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			199,475,000	A
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	199,475,000	199,475,000	*
ZA	<i>Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBUPrasarana Transportasi Jalan</i>			585,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			27,355,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	27,355,000	27,355,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>			73,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Honor Output Kegiatan	1.0 Tahun	73,000,000	73,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			25,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	25,000,000	25,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			150,800,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	150,800,000	150,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			149,320,000	A
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	149,320,000	149,320,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			89,775,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	89,775,000	89,775,000	*
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			69,750,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	69,750,000	69,750,000	*
ZB	<i>Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta</i>			455,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			20,370,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	20,370,000	20,370,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			17,705,000	
	- Honor Output Kegiatan	1.0 Tahun	17,705,000	17,705,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			82,500,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	82,500,000	82,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			12,700,000	
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	12,700,000	12,700,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			151,450,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	151,450,000	151,450,000	*
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			59,775,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	59,775,000	59,775,000	*
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			110,500,000	A
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	110,500,000	110,500,000	*
ZC	<i>Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ</i>			150,002,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			25,000,000	
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	25,000,000	25,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			22,765,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	22,765,000	22,765,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			102,237,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	102,237,000	102,237,000	*
ZD	<i>Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan</i>			429,992,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			25,000,000	PNP
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	25,000,000	25,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			52,500,000	PNP
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	52,500,000	52,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			22,200,000	PNP
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	22,200,000	22,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			173,342,000	A PNP
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	173,342,000	173,342,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			156,950,000	A PNP
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	156,950,000	156,950,000	
ZF	<i>Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri</i>			965,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			65,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	65,000,000	65,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			750,000,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	750,000,000	750,000,000	
ZG	<i>Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi</i>			335,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			35,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	35,000,000	35,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	45,000,000	45,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(03)
(352597)
Rp. 67,733,026,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Darat
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			180,000,000	A	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	180,000,000	180,000,000	*	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	A	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	45,000,000	45,000,000	*	
ZH	<i>Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024</i>			234,000,000		
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000		RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			18,000,000		RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	18,000,000	18,000,000		
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000		RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			120,000,000	A	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	120,000,000	120,000,000	*	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			36,000,000	A	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	36,000,000	36,000,000	*	
ZI	<i>Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Trasnportasi Jalan</i>			223,000,000		
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000		RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000		
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			21,000,000		RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	21,000,000	21,000,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			22,000,000		RM
	- Belanja Jasa Profesi	1.0 Tahun	22,000,000	22,000,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	A	RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	*	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			90,000,000	A	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	90,000,000	90,000,000	*	
ZJ	<i>Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</i>			215,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			35,000,000	
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	35,000,000	35,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			35,000,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	35,000,000	35,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	45,000,000	45,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			100,000,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	*
ZK	<i>Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area</i>			185,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			35,000,000	
	- Belanja Sewa	1.0 Tahun	35,000,000	35,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			120,000,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	120,000,000	120,000,000	*
ZL	<i>Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait</i>			205,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	
	- Belanja Sewa	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			100,000,000	A
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	*
ZM	<i>INHOUSE CONSULTANT DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN</i>			500,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			500,000,000	
ZN	- Inhouse Consultant Pendampingan Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Jalan	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	
	<i>Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan</i>			275,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			85,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	85,000,000	85,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	*
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			160,000,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	160,000,000	160,000,000	*
ZO	<i>Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</i>			130,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			100,000,000	A RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	*
ZQ	<i>Dukungan Manajemen Resiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan</i>			105,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	A RM
	- Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	*
ZS	<i>Penyusutan dan Pengiriman Arsip</i>			300,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			50,000,000	RM
	- Belnja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			50,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			100,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja perjalanan biasa	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	A
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	2.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		5,000,000,000	*

4640.PBF.209	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian		2,500,000,000	
051	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya)			2,500,000,000	U
A	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)			2,500,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (P	1.0 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	
4640.PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian		2,500,000,000	
501	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing)			2,500,000,000	U
A	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)			2,500,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (	1.0 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			21,243,924,000	
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat			610,670,000	
4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	6.0 Unit, m2, Paket		610,670,000	

4596.EBB.906	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	6.0 unit		610,670,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			610,670,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			610,670,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.133-Jakarta IV) - Roll Meter	2.0 Unit	1,000,000	2,000,000	
	- Mini PC	5.0 Unit	15,000,000	75,000,000	
	- Printer Portable	5.0 Unit	5,500,000	27,500,000	
	- Drone	2.0 Unit	25,000,000	50,000,000	
	- Hamer Test	2.0 Unit	8,000,000	16,000,000	
	- Laser Meter	2.0 Unit	2,800,000	5,600,000	
	- Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4	1.0 Unit	434,570,000	434,570,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			20,633,254,000	
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,547,254,000	

	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4670.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,547,254,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			5,547,254,000	U
E	TANPA SUB KOMPONEN			5,547,254,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			1,918,372,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Honorarium Pramubakti Penunjang Petugas Administrasi dan Teknis S1	221.0 OB	5,000,000	1,105,000,000	
	- Honorarium Pengemudi Pejabat Eselon II	13.0 OB	5,344,000	69,472,000	
	- Biaya Minum Makanan Untuk Rapat	1.0 Tahun	145,000,000	145,000,000	
	- Pengadaan Air Minum Langganan Surat Kabar Berita Majalah Langganan Bunga Tanaman Hias	12.0 OB	11,250,000	135,000,000	
	- Honorarium Pramubakti Penunjang Administrasi dan Teknis SMA	91.0 OB	4,900,000	445,900,000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi dan PPNPN	24.0 Set	750,000	18,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			50,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas pos Pusat	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			468,072,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan	120.0 OB	1,410,000	169,200,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab SAI	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Koordinator SAI	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Honorarium Ketua SAI	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Anggota SAI	48.0 OB	150,000	7,200,000	
	- Honorarium Pengurus Penyimpan BMN	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	1,896,000	22,752,000	
	- Honorarium PPK	60.0 OB	3,078,000	184,680,000	
	- Honorarium Penguji dan Penandatanganan SPM	12.0 OB	2,172,000	26,064,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	3,798,000	45,576,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			285,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	140,000,000	140,000,000	
	- Belanja Barang Keperluan Satker	1.0 Tahun	145,000,000	145,000,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			16,320,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	24.0 OB	680,000	16,320,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 67,733,026,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Pengadaan Toner dan Tinta Mesin Photocopy dan Printer - Biaya Penggandaan dan Penjiilidan - Pengadaan Seragam Pegawai Negeri Sipil PNS - Belanja Barang Operasional Pendukung Kegiatan Angkutan Lebaran Angkutan Natal dan Tahun Baru	1.0 Tahun 1.0 Tahun 60.0 Stel 1.0 Tahun	178,000,000 185,000,000 857,000 170,000,000	584,420,000 178,000,000 185,000,000 51,420,000 170,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Alat Tulis Kantor dan Computer Supplies - Pengadaan Barang Cetakan	1.0 Tahun 1.0 Tahun	170,000,000 180,000,000	350,000,000 170,000,000 180,000,000	RM
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Langganan Layanan Internet - Langganan Bunga Tanaman Hias - Langganan PLN dan PAM	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	95,000,000 55,000,000 75,000,000	225,000,000 95,000,000 55,000,000 75,000,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Sewa Mesin Photocopy 2 Unit - Sewa Gudang Kantor	1.0 Tahun 1.0 Tahun	140,000,000 200,000,000	340,000,000 140,000,000 200,000,000	2 RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 - Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 - Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 - Biaya Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Elektronik	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	38,730,000 269,200,000 3,640,000 20,000,000 1,000,000 127,500,000	460,070,000 38,730,000 269,200,000 3,640,000 20,000,000 1,000,000 127,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	300,000,000	300,000,000	A RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	A RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	A RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV) - Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	250,000,000	250,000,000	A RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(022)
(03)
(352597)
Rp. 67,733,026,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ditjen Perhubungan Darat
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4670.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		15,086,000,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4670.EBD.909	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	3.0 Laporan		15,086,000,000	
051	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat			15,086,000,000	U
A	Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua			13,586,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			13,586,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	1.0 Tahun	13,586,000,000	13,586,000,000	
B	Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025			1,500,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			1,500,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025, Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026	1.0 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.
Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

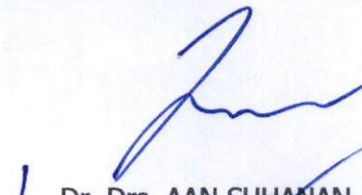
Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

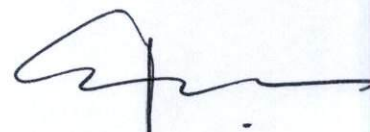
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025
Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan


TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Tauladan, S.Si., M.T.
Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

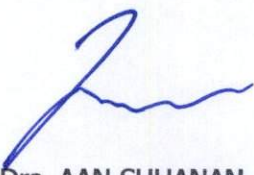
Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025
Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan


TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama perusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

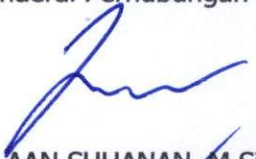
Kegiatan

1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp.	46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	20.633.254.000,00

Anggaran

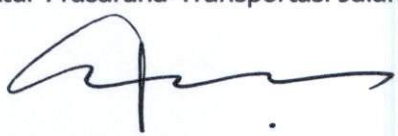
Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat


 Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
 NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan


 TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
 NIP. 19700910 199703 1 002

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Penunjang teknis transportasi darat | Rp. | 46.489.102.000,00 |
| 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. | 610.670.000,00 |
| 3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. | 20.633.254.000,00 |

Anggaran

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Jakarta, 2 Juni 2025

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 01 Meningkatkan coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02 Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	1. Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung wilayah perkotaan; 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi; 3. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda; 4. Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 5. Survey Identifikasi Potensi Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antar Moda dan Intermoda 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Survey Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam rangka dukungan Angkutan Masal Perkotaan; 8. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi; 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda) (5 Paket)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	7.449.795.000	Subdit Fasprim
2	SK 02 Meningkatkan konektivitas Jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEX, KSN, & KJ), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01 Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	10.002.313.000	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 02 Jumlah dokumen penyipan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyipan KPBU	%	100	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyipaan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalanin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6.540.000.000	Subdit Kepengusahaan Prasarana	
		IKK 04 Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / Jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjaksemakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	7.074.994.000	Subdit Kepengusahaan Prasarana
3	SK 18 Meningkatkan kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26 Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Pelugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan; 8. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 9. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor) (4 Paket) (12 Lokasi)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	26.736.000.000	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SKp04 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp04 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Keasipian, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	1. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 2. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 3. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 4. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 5. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 6. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 7. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 8. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 9. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 10. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 11. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 12. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 13. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 13. Operasional Pemeliharaan Kantor;	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	9.929.924.000	Seluruh Subdit dan Tata Usaha

Jakarta, 3 Januari 2025

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


TONI TAULAD, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KJ), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit 5. Terminal Angkutan Jalan)	0,852	0,853	0,854	0,855	0,856	0,857	0,858	0,859	0,860	0,861	0,862	0,863	28.703.749.000	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077	Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	269.332.000	Terminal Barang
3	SK 02	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 3. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 4. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 5. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan;	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47	2.264.029.000	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6.540.000.000	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjakasikan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	7.074.994.000	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan;	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	3.368.000.000	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 3. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	13.368.000.000	Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	1. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	1.654.987.000	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30	1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	82,30	1.654.987.000	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 5 Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	94,10	1.309.974.000	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan);	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	215.000.000	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	1.309.974.000	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

Jakarta, 2 Juni 2025

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


TONI TAULADAN, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN JANUARI TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	TARGET BULAN-1	REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA				CAPAIAN ANGGARAN	
						volume	%	Volume	Volume	%				%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatkan coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	1. Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung wilayah perkotaan; 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi; 3. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda; 4. Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 5. Survey Identifikasi Potensi Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antar Moda dan Intermoda 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Survey Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam rangka dukungan Angkutan Masal Perkotaan; 8. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi; 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda) (5 Paket)	7,449,795,000	100,00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK 02 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)	10,002,313,000	100,00%	0.00	44,350,000	0.00%	0.44%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 02	Jumlah dokumen penyajian KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyajian KPBU	%	100	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalan Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	6,540,000,000	100,00%	0.00	40,000,000	0.00%	0.61%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyajian KPBU Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	TARGET BULAN-1		REALISASI BULAN-1		% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
						Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60	7,074,994,000	100,00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekaptulasi tindak lanjut kerjasama kepengusahaan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
3	SK 18 Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	26,736,000,000	100,00%	0.00	39,277,000	100.00%	0.15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan layanan penimbangan dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemerintahan WDM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Pedirjen Hubdat No PR DKJ 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Pedirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengeoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024. Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SKp 4 Meningkatnya Birokrasi Digen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp 4	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Keasapan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	9,929,924,000	100,00%	0.00	373,449,500	0.00%	3.76%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan Perkantoran, Keasapan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2		% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	SKK 26	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Monitoring Pelaksanaan Penencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan; 8. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 9. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor) (4 Paket) (12 Lokasi)	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	60,00	100%	26.736.000.000	100,00%	0,00	39.277.000	100,00%	0,15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan layanan penimbangan dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024. Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan belum tersusunnya SPM sehingga saat ini masih menggunakan target penyusulan sesuai dengan standar perhitungan / spesifikasi teknis eksisting.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor	
4	SKp0 4	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	SKKp0 4	%	75	1. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 2. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 3. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 4. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 5. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan); 6. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 7. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 8. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 9. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 10. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 11. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 12. Penyusunan dan Pengiriman Aspi; 12. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 13. Operasional Pemeliharaan Kantor;	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	60	60	100%	9.929.924.000	100,00%	0,00	373.449.500	0,00%	3,76%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penial penyelenggaraan kegiatan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat. Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan belum tersusunnya SPM sehingga saat ini masih menggunakan target penyusunan sesuai dengan standar perhitungan / spesifikasi teknis eksisting.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepenguasaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN MARET TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3		% CAPAIAN BULAN-3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	1. Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung wilayah perkotaan; 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi; 3. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda; 4. Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 5. Survey Identifikasi Potensi Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antar Moda dan Intermoda 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Survey Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam rangka dukungan Angkutan Massal Perkotaan; 8. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi; 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda) (5 Paket)	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	60	60	100%	7.449.795.000	100,00%	0,00	40.114.420	0,00%	0,54%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KT), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	60,00	60,00	100%	10.002.313.000	100,00%	92,23	152.748.113	153,72%	1,5271%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 02	Jumlah dokumen penyajian KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyajian KPBU	%	100	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalain Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Jumlah dokumen penyajian KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyajian KPBU	60	60	100%	6.540.000.000	100,00%	0,00	54.312.000	0,00%	0,83%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyajian KPBU Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / Jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjakan/malamkan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket)	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / Jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	100	100	100%	7.074.994.000	100,00%	0,00	86.060.904	0,00%	1,22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi tindak lanjut kerjasama pengusahaan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
3	SK 18	Meningkatnya kepastuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan; 8. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 9. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor) (4 Paket) (12 Lokasi)	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	60,00	60,00	100%	26.736.000.000	100,00%	0,00	76.266.758	0,00%	0,29%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan layanan penimbangan dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR.DIRD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024. Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK04	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	1. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 2. Penyusunan SK/KP (LAKIP, LAPTAK, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 3. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 4. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 5. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan); 6. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 7. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 8. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 9. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 10. Dilat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 11. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 12. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 12. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 13. Operasional Pemeliharaan Kantor;	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	60	60	100%	9.929.924.000	100,00%	0,00	1.546.339.980	0,00%	15,57%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN APRIL TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4		% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%								Volume	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	1. Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung wilayah perkotaan; 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi; 3. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda; 4. Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 5. Survei Identifikasi Potensi Fasilitas Perpendahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antar Moda dan Intermoda 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Survei Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam rangka dukungan Angkutan Massal Perkotaan; 8. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi; 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda) (5 Paket)	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	60	60	100%	7.449.795.000	100,00%	0,00	440.089.420	0,00%	5,91%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK 02		IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	60,00	60,00	100%	10.002.313.000	100,00%	92,23	152.748.113	153,72%	1,5271%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Meningkatkan skor pemenuhan SPM Terminal Tipe A melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Terminal Tipe A 2. Melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen teknis pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi Terminal Tipe A 3. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi maupun operasional Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 02	Jumlah dokumen penyalpan KPBu diterima oleh simpul KPBu / Jumlah dokumen penyalpan KPBu	%	100	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBu Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBu Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBu Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalatin Proyek KPBu Terminal (1 Paket).	Jumlah dokumen penyalpan KPBu diterima oleh simpul KPBu / Jumlah dokumen penyalpan KPBu	100	100	100%	6.540.000.000	100,00%	0,00	140.372.904	0,00%	2,15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyalpan KPBu Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / Jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjakan/samakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket)	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / Jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	60	60	100%	7.074.994.000	100,00%	0,00	86.060.904	0,00%	1,22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi tindak lanjut kerjasama kepengusahaan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan; 8. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 9. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor) (4 Paket) (12 Lokasi)	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	60,00	60,00	100%	26.736.000.000	100,00%	0,00	76.266.758	0,00%	0,29%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan layanan penimbangan dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024. Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp04	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Keasipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	1. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 2. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPATK, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 3. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 4. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 5. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 6. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 7. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 8. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 9. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 10. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 11. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 12. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 12. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 13. Operasional Pemeliharaan Kantor;	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Keasipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	75	75	100%	9.929.924.000	100,00%	0,00	1.249.621.906	0,00%	12,58%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan Perkantoran, Keasipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

Selish

31.070.729.000

75

67.733.026.000
98.883.755.000
31.150.729.000
92.811.921.000

2.145.160.005
2.145.160.005
63.478.708.397
61.333.548.392
92808477266

90.663.317.261



98883755000	30838657568
91.627.413.000	27.646.314.974
7.256.342.000	3.192.342.394

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN MEI TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5		% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	1. Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung wilayah perkotaan; 2. Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi; 3. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda; 4. Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 5. Survei Identifikasi Potensi Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antar Moda dan Intermoda 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Survei Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam rangka dukungan Angkutan Massal Perkotaan; 8. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi; 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda) (5 Paket)	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	60	60	100%	7,449,795,000	100,00%	0.00	440,089,420	0.00%	5.91%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK 02		IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 6. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 7. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 8. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 9. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan) (14 Paket)	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	60.00	60.00	100%	10,002,313,000	100,00%	92.23	152,748,113	153.72%	1.5271%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Meningkatkan skor pemenuhan SPM Terminal Tipe A melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Terminal Tipe A 2. Melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen teknis pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi Terminal Tipe A 3. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi maupun operasional Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPB / Jumlah dokumen penyiapan KPB	%	100	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPB Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPB Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPB Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalain Proyek KPB Terminal (1 Paket).	Jumlah dokumen penyiapan KPB diterima oleh simpul KPB / Jumlah dokumen penyiapan KPB	60	60	100%	6,540,000,000	100,00%	0.00	140,372,904	0.00%	2.15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyiapan KPB Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjasamakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket)	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	100	100	100%	7,074,994,000	100,00%	0.00	86,060,904	0.00%	1.22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan rekapitulasi tindak lanjut kerjasama pengusahaan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Kepengusahaan Prasarana
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan; 8. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 9. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor) (4 Paket) (12 Lokasi)	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	60.00	60.00	100%	26,736,000,000	100,00%	0.00	76,266,758	0.00%	0.29%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan layanan penimbangan dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PK 0803.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Perlu adanya jaminan keselamatan bagi petugas UPPKB; 8. Pengoptimalan dan pemerataan jaringan internet untuk UPPKB; 9. Melakukan penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimum) UPPKB Tahun 2024. Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp04	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	1. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 2. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 3. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 4. Penyusunan Peraturan Penunjang-Undang di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 5. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 6. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 7. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 8. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 9. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 10. Dilat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 11. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 12. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 13. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 13. Operasional Pemeliharaan Kantor;	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	60	60	100%	9,929,924,000	100,00%	5.32	1,249,621,906	8.87%	12.58%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan indikator-indikator yang menjadi faktor penilai penyelenggaraan kegiatan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN JUNI TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KJ), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit 5. Terminal Angkutan Jalan	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	0.852	0.852	100.00%	28,703,749,000	100.00%	0.958	152,748,113	112.44%	0.53%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan layanan pengoperasian terminal sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	0.077	0.077	100.00%	269,332,000	100.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan pengoperasian layanan terminal barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Barang
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 3. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 4. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 5. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan;	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	90.47	90.47	100.00%	2,264,029,000	100.00%	90.47	322,939,096	100.00%	14.26%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	60	60	100.00%	6,540,000,000	100.00%	0.0	140,372,904	0.00%	2.15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait dokumen penyiapan KPBU rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan

			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjasamakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket)	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	60	60	100.00%	7,074,994,000	100.00%	0.0	86,060,904	0.00%	1.22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait kegiatan kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman pada tahun rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan;	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	60	60	100.00%	3,368,000,000	100.00%	0.0	21,000,000	0.00%	0.62%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 3. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	0.636	0.636	100.00%	13,368,000,000	100.00%	0.636	55,266,758	100.00%	0.41%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan pengoperasian fasilitas penimbangan serta melakukan identifikasi akan adanya tantangan dan hambatan agar dapat dilakukan percepatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.38	1. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.38	3.38	100.00%	1,654,987,000	100.00%	3	40,114,420	100.06%	2.42%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82.3	1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82.30	82.30	100.00%	1,654,987,000	100.00%	83.51	10,000,000	101.47%	0.60%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melengkapi data dukung dan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94.1	1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 5 Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri;	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94.10	94.10	100.00%	1,309,974,000	100.00%	98.89	#####	105.09%	80.17%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan monitoring secara periodik atas indikator - indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perhitungan Nilai IKPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3.2	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan);	Indeks Pengelolaan Aset	3.20	3.20	100.00%	215,000,000	100.00%	0	-	0.00%	0.00%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan dan optimalisasi dalam kegiatan pengelolaan aset Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Tingkat Digitalisasi Arsip	85,51	85,51	100.00%	1,309,974,000	100.00%	0	77,073,180	0.00%	5.88%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisi kepada seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2. Melakukan pengelolaan ARSIP dan mengirimkan ARSIP ke gedung arsip dalam rangka penyusunan arsip 3. Melakukan monitoring secara periodik atas indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target IKK yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN JULI TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KJ), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit 5. Terminal Angkutan Jalan	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	0.852	0.852	100.00%	28,703,749,000	100.00%	0.958	152,748,113	112.44%	0.53%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan layanan pengoperasian terminal sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	0.077	0.077	100.00%	269,332,000	100.00%	0	199,888,156	0.00%	74.22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan pengoperasian layanan terminal barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Barang
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 3. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 4. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 5. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 6. Monitoring dan Evaluasi Terminal Penumpang	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	90.47	90.47	100.00%	2,264,029,000	100.00%	90.47	159,941,512	100.00%	7.06%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	60	60	100.00%	6,540,000,000	100.00%	0	140,372,904	0.00%	2.15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait dokumen penyiapan KPBU rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjasamakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket) 5.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan dan Kepengusahaan	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	60	60	100.00%	7,074,994,000	100.00%	21	157,436,598	35.00%	2.23%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait kegiatan kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman pada tahun rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkat an Fasilitas Penimbangan;	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	60	60	100.00%	3,368,000,000	100.00%	0	21,000,000	0.00%	0.62%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan inventarisasi dan monev atas pelaksanaan SPM pada fasilitas penimbangan; 2. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan adanya pedoman SPM kepada seluruh pengelola fasilitas penimbangan; Kendala: Belum adanya sosialisasi karena saat ini pedoman SPM masih dalam	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 3. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penimbangan Kendaraan	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	0.636	0.636	100.00%	13,368,000,000	100.00%	0.636	226,221,609	100.00%	1.69%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan pengoperasian fasilitas penimbangan serta melakukan identifikasi akan adanya tantangan dan hambatan agar dapat dilakukan percepatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.38	Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.38	3.38	100.00%	105,000,000	100.00%	3.382	-	100.06%	0.00%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82.3	1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDPA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82.30	82.30	100.00%	67,272,000	100.00%	83.51	37,250,000	101.47%	55.37%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melengkapi data dukung dan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6		% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94.1	1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 5. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 8. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025, Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94.10	94.10	100.00%	4,447,676,000	100.00%	98.20	#####	104.36%	82.16%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan monitoring secara periodik atas indikator - indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perhitungan Nilai IKPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3.2	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan);	Indeks Pengelolaan Aset	3.20	3.20	100.00%	215,000,000	100.00%	3.49	133,362,000	109.06%	62.03%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan dan optimalisasi dalam kegiatan pengelolaan aset	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85.51	1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusunan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Tingkat Digitalisasi Arsip	85.51	86	100.00%	1,309,974,000	100.00%	85.51	1,781,515	100.00%	0.14%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisi kepada seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2. Melakukan pengelolaan ARSIP dan mengirimkan ARSIP ke gedung arsip dalam rangka penyusutan arsip 3. Melakukan monitoring secara periodik atas indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target IKK yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit 5. Terminal Angkutan Jalan)	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	0.852	0.852	100.00%	28,703,749,000	100.00%	0.928	152,748,113	108.92%	0.53%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan layanan pengoperasian terminal sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	0.077	0.077	100.00%	269,332,000	100.00%	0	199,888,156	0.00%	74.22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan pengoperasian layanan terminal barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Barang
			IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 3. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 4. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 5. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 6. Monitoring dan Evaluasi Terminal Penumpang	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	90.47	90.47	100.00%	2,264,029,000	100.00%	90.47	166,079,512	100.00%	7.34%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
									volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	60	60	100.00%	6,540,000,000	100.00%	0	140,372,904	0.00%	2.15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait dokumen penyiapan KPBU rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjakamakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket) 5.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan dan Kepengusahaan	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	60	60	100.00%	7,074,994,000	100.00%	21	162,765,089	35.00%	2.30%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait kegiatan kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman pada tahun rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkat an Fasilitas Penimbangan;	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	60	60	100.00%	3,368,000,000	100.00%	0	21,000,000	0.00%	0.62%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan inventarisasi dan movev atas pelaksanaan SPM pada fasilitas penimbangan; 2. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan adanya pedoman SPM kepada seluruh pengelola fasilitas penimbangan; Kendala: Belum adanya sosialisasi karena saat ini pedoman SPM masih dalam	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 3. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penimbangan Kendaraan Bermotor	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	0.636	0.636	100.00%	13,368,000,000	100.00%	0.636	240,946,072	100.00%	1.80%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan pengoperasian fasilitas penimbangan serta melakukan identifikasi akan adanya tantangan dan hambatan agar dapat dilakukan percepatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan	Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.38	Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.38	3.38	100.00%	105,000,000	100.00%	3.382	-	100.06%	0.00%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82.3	1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82.30	82.30	100.00%	67,272,000	100.00%	82.76	67,250,000	100.56%	99.97%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melengkapi data dukung dan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94.1	1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 5 Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 8. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 9. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025, Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94.10	94.10	100.00%	4,447,676,000	100.00%	98.48	4,432,510,836	104.65%	99.66%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan monitoring secara periodik atas indikator - indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perhitungan Nilai IKPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3.2	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan);	Indeks Pengelolaan Aset	3.20	3.20	100.00%	215,000,000	100.00%	3.56	143,611,000	111.25%	66.80%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan dan optimalisasi dalam kegiatan pengelolaan aset	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85.51	1. Penyusutan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusutan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Tingkat Digitalisasi Arsip	85.51	86	100.00%	1,309,974,000	100.00%	34.50	1,781,515	40.35%	0.14%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisi kepada seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2. Melakukan pengelolaan ARSIP dan mengirimkan ARSIP ke gedung arsip dalam rangka penyusutan arsip 3. Melakukan monitoring secara periodik atas indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target IKK yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2025

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.852	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Terminal Angkutan Jalan)	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	0.852	0.852	100.00%	28,703,749,000	100.00%	0.928	152,748,113	108.92%	0.53%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan layanan pengoperasian terminal sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0.077	Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang di Seluruh Indonesia	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	0.077	0.077	100.00%	269,332,000	100.00%	0	199,888,156	0.00%	74.22%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan pengoperasian layanan terminal barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Barang
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90.47	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Tipe A; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Barang; 3. Bimbingan Teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 4. Sertifikasi Kompetensi Terminal Angkutan Jalan; 5. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 6. Monitoring dan Evaluasi Terminal Penumpang	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	90.47	90.47	100.00%	2,264,029,000	100.00%	90.47	180,725,212	100.00%	7.98%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Terminal Penumpang
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional); 5. Penyusunan Dokumen Andalin Proyek KPBU Terminal (1 Paket).	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	60	60	100.00%	6,540,000,000	100.00%	0	140,372,904	0.00%	2.15%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait dokumen penyiapan KPBU rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA Volume (13)	REALISASI ANGGARAN Volume (14)	CAPAIAN KINERJA % (15)	CAPAIAN ANGGARAN % (16)				
									Volume (9)	% (10)	Volume (11)	% (12)								
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang dikerjakamkan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan Prasarana) (5 Paket) 5.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan dan Kepengusahaan	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	60	60	100.00%	7,074,994,000	100.00%	21	176,845,848	35.00%	2.50%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi terkait kegiatan kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman pada tahun rencana dan eksisting Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun Kendala	Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan;	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	60	60	100.00%	3,368,000,000	100.00%	0	21,000,000	0.00%	0.62%	BELUM TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Melakukan inventarisasi dan monev atas pelaksanaan SPM pada fasilitas penimbangan; 2. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan adanya pedoman SPM kepada seluruh pengelola fasilitas penimbangan; Kendala: Belum adanya sosialisasi karena saat ini pedoman SPM masih dalam	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0.636	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 3. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor) 5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penimbangan Kendaraan Bermotor	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	0.636	0.636	100.00%	13,368,000,000	100.00%	0.636	252,591,612	100.00%	1.89%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan pengoperasian fasilitas penimbangan serta melakukan identifikasi akan adanya tantangan dan hambatan agar dapat dilakukan percepatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan	Penimbangan Kendaraan Bermotor
			IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.38	Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.38	3.38	100.00%	105,000,000	100.00%	3.382	-	100.06%	0.00%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan sesuai SPM Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82.3	1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82.30	82.30	100.00%	67,272,000	100.00%	82.76	67,250,000	100.56%	99.97%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melengkapi data dukung dan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kendala: Adanya Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
										TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
										Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94.1	1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait; 5 Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area 8. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025, Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 9. Dukungan Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94.10	94.10	100.00%	4,447,676,000	100.00%	98.48	4,502,927,133	104.65%	101.24%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan monitoring secara periodik atas indikator - indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perhitungan Nilai IKPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3.2	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan);	Indeks Pengelolaan Aset	3.20	3.20	100.00%	215,000,000	100.00%	3.56	147,053,000	111.25%	68.40%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : Melakukan percepatan dan optimalisasi dalam kegiatan pengelolaan aset	Tata Usaha dan Seluruh Subdit
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85.51	1. Penyusutan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusutan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Tingkat Digitalisasi Arsip	85.51	86	100.00%	1,309,974,000	100.00%	34.50	300,554,146	40.35%	22.94%	SUDAH TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Mengoptimalkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisi kepada seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2. Melakukan pengelolaan ARSIP dan mengirimkan ARSIP ke gedung arsip dalam rangka penyusutan arsip 3. Melakukan monitoring secara periodik atas indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target IKK yang telah ditetapkan	Tata Usaha dan Seluruh Subdit